

2021

LAPORAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN





Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. ISU STRATEGIS	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	8
D. ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN	9
E. SISTEMATIKA	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. ARAH KEBIJAKAN	12
B. SASARAN STRATEGI	14
C. PERJANJIAN KINERJA	15
D. PEMBIAYAAN	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN SDM TAHUN 2021	19
B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN SDM TAHUN 2020 DAN 2021 ..	25
C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN SDM TAHUN 2020 DAN 2021	30
D. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET RPJMN	39
E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	41
F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA	48
G. REALISASI ANGGARAN.....	52
BAB IV PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sasaran Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020-2024	14
Tabel 2. 2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2021.....	15
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2021.....	16
Tabel 2. 4 Perubahan Alokasi dan Realokasi Pusdik SDM Kesehatan tahun 2021.....	17
Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Dalam Mendukung Indikator Kinerja Tahun 2021	18
Tabel 3. 1 Matrik Kertas Kerja Indikator Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024.....	19
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2021	21
Tabel 3. 3 Target dan Capaian Penerima Bantuan Afirmasi PADINAKES Tahun 2021	23
Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021	26
Tabel 3. 5 Data SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021	40
Tabel 3. 6 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.....	41
Tabel 3.7 Perbandingan Jumlah SDM dan Penggunaan Anggaran (DIPA Pusdik SDM Kesehatan) Terhadap Pencapaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021	46
Tabel 3. 8 Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan berdasarkan KRO/RO dalam mencapai kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021	47
Tabel 3. 9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2021	48
Tabel 3. 10 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2021.....	53
Tabel 3.11 Alokasi dan Realisasi Berdasarkan Indikator Kinerja Pusdik SDM Kesehatan T.A 2021...	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Susunan Organisasi Pusdik SDM Kesehatan.....	10
--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2020 dan 2021.....	29
Grafik 3. 2 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Penerima Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK Tahun 2020 dan 2021.....	34
Grafik 3. 3 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2020 dan 2021.....	37
Grafik 3.4 Distribusi Lulusan Berdasarkan Jurusan Poltekkes Kemenkes T.A 2021.....	39
Grafik 3. 5 Persentase Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Umur Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021	43
Grafik 3. 6 Persentase SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021	44
Grafik 3. 7 Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021	44
Grafik 3. 8 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021	45
Grafik 3.9 Alokasi dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja T.A 2021.....	54

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin-Nya maka Laporan Kinerja Instansi (LKj) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDM Kesehatan) Tahun 2021 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan gambaran capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan periode tahun 2020-2024 yang disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdik SDM Kesehatan sebagai penjabaran prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menciptakan *Good Governance*. Laporan kinerja ini sebagai bagian dari evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, target kinerja Pusdik SDM Kesehatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Tahun 2021. Selain itu laporan kinerja ini memberikan gambaran hasil perbandingan capaian target dan sasaran pada setiap tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target periode lima tahun sehingga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Adanya wabah covid -19 hampir 2 tahun ini, memaksa kita beradaptasi dari berbagai sisi termasuk dalam pola kerja Pusdik SDM Kesehatan salah satunya dengan menerapkan *Work From Home* (WFH). Dalam pencapaian kinerja atas target yang telah ditetapkan, berbagai strategi juga telah dilakukan termasuk pelaksanaan program dan kegiatan secara *online/* daring. Pusdik SDM Kesehatan terus berupaya untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dan terus berupaya memperbaiki segala kekurangan yang tidak terlepas dari hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan kinerja dan menyadari masih terdapat kekurangan sehingga saran,

kritik, dan masukan sangat kami harapkan guna perbaikan laporan kinerja tahun yang akan datang. Semoga laporan kinerja dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Januari 2022

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan



Dr. Sugiyanto, M.App.Sc
NIP. 196607221989031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

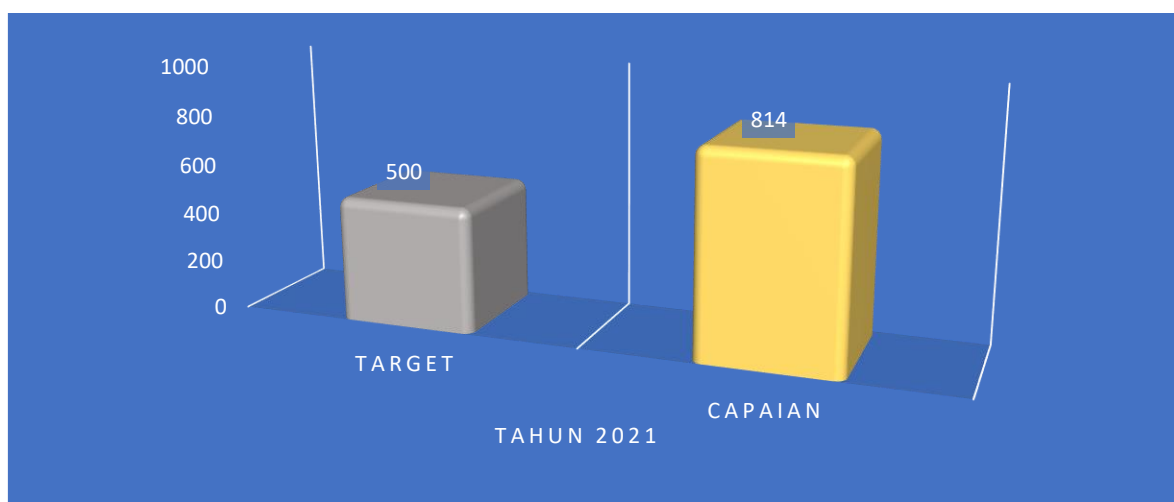
Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Dalam dua tahun terakhir menjadi kondisi yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, adanya pandemic covid-19 melanda Indonesia bahkan dunia membuat perubahan dan terpaksa harus beradaptasi dengan gaya baru baik dalam pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan melakukan *work from home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) bahkan pernah full WFH ketika DKI Jakarta ditetapkan sebagai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ketika level covid-19 pada level 4.

Kondisi ini tentunya berpengaruh pada pencapaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan, namun demikian berbagai strategi dan upaya terus dilakukan agar kinerja Pusdik SDM Kesehatan yang telah ditetapkan tetap tercapai dengan maksimal. Beberapa pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara *online* atau *blended*, penguatan system informasi dan aplikasi juga menjadi pilihan yang cukup efektif dan efisien.

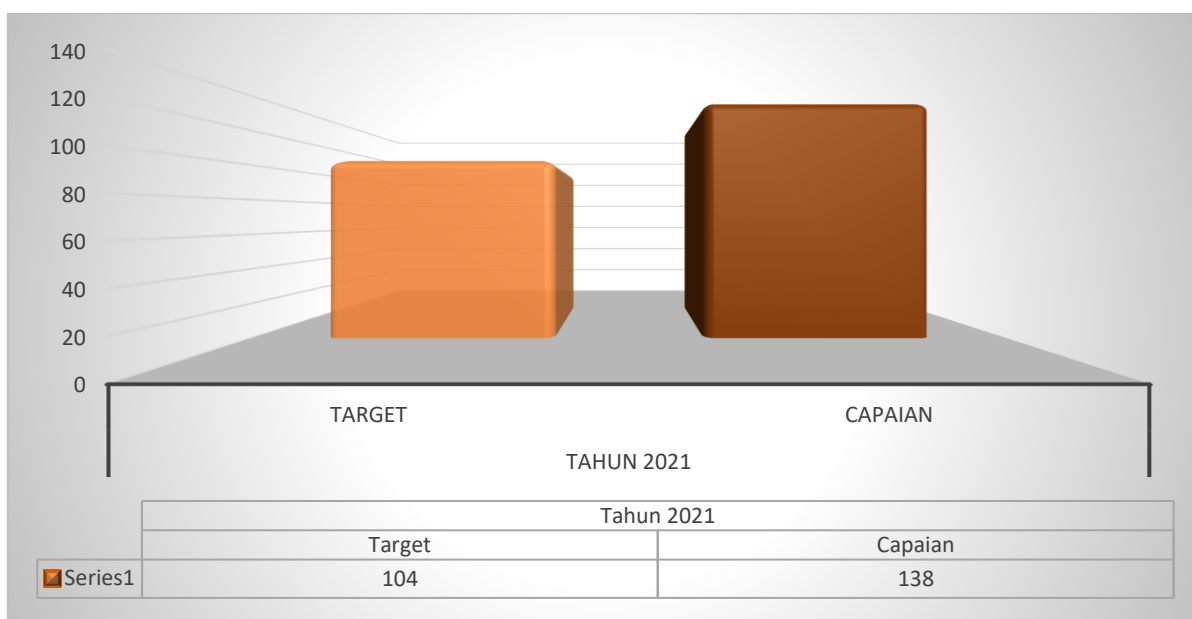
Pada tahun 2021 ini Pusdik SDM Kesehatan telah menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja, terdapat penambahan 1 (satu) indikator kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2020. Capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan tahun 2021 dapat di lihat pada grafik berikut :

Grafik 1. Capaian Kinerja Indikator Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK



Capaian indikator jumlah penerima bantuan biaya Pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK tercapai sebanyak 184 orang (162,8%). Capaian tersebut telah tercapai melebihi 100% dikarenakan adanya perubahan skema penerimaan mahasiswa yang direncana awal penerimaan dari nol (0) tahun namun skema tersebut berubah menjadi penerima bantuan lebih banyak dari mahasiswa semester akhir. Permenkes No. 27 tahun 2021 tentang program afirmasi PADINAKES telah di tetapkan pada tanggal 26 September 2021. Kemudian melalui keputusan Kepala Badan PPSDMK Nomor HK.02.02/III/13963/2021 tentang Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Tahun 2021 pada tanggal 19 November 2021 sebanyak 814 orang peserta penerima bantuan biaya Pendidikan tenaga kesehatan (PADINAKES).

Grafik 2. Jumlah prodi dan lembaga Pendidikan SDM Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan



Capaian indikator prodi dan lembaga pendidikan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan tercapai 138 prodi dan lembaga (132,69%) dari target 104 (kumulatif). Capaian target ini dihitung secara kuantitas dan kualitas. Capaian kuantitas melalui rekomendasi pembukaan dan penutupan prodi baru, sedangkan secara kualitas dihitung melalui peningkatan status akreditasi, pengembangan *center of excellent* (CoE), dan Rintisan Kelas Internasional (RKI).

Grafik 3. Jumlah Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang di dayagunakan di fasyankes Pemerintah



Capaian indikator tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kemenkes RI yang didayagunakan di fasyankes Pemerintah pada tahun 2021 telah tercapai sebanyak 764 mahasiswa (152,8%). Lulusan tersebut didayagunakan di fasyankes Pemerintah seperti fasyankes Pusat, daerah, TNI/Polri baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas.

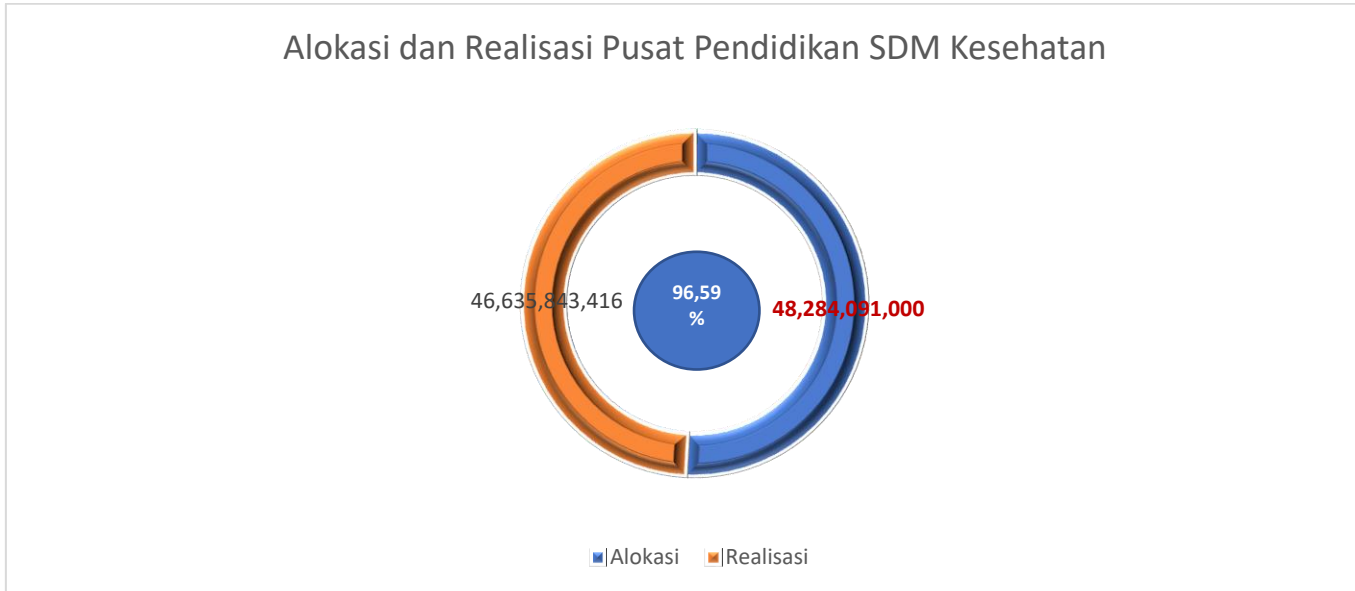
Realisasi Anggaran

Dalam perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan pada tanggal 2 Desember 2020, alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 77.531.622.000, akan tetapi terjadinya realokasi/refocusing / revisi salah satunya untuk penanganan covid-19 sehingga sampai dengan 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp 60.840.729.000 termasuk realokasi Poltekkes Rp 12.556.638.000 dan UNFPA sebesar Rp 1.816.328.000. Realisasi Anggaran Total Pusdik SDM berikut realokasi Poltekkes Kemenkes Rp 58.431.651.308 (96,04%) dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- Realisasi anggaran Pusdik SDM sebesar Rp 46.635.843.416 (96,59%) dari alokasi Rp 48.284.091.000. Realisasi di Poltekkes Program Afirmasi PADINAKES Rp 10.325.757.292 (93,94%) dari alokasi Rp 11.076.428.000 dan Pengabmas Unggulan Rp 1.470.210.000 (99,31%) dari alokasi Rp 1.480.210.000 serta realisasi UNFPA sebesar Rp 1.816.328.000 (100%) dari alokasi Rp 1.816.328.000.

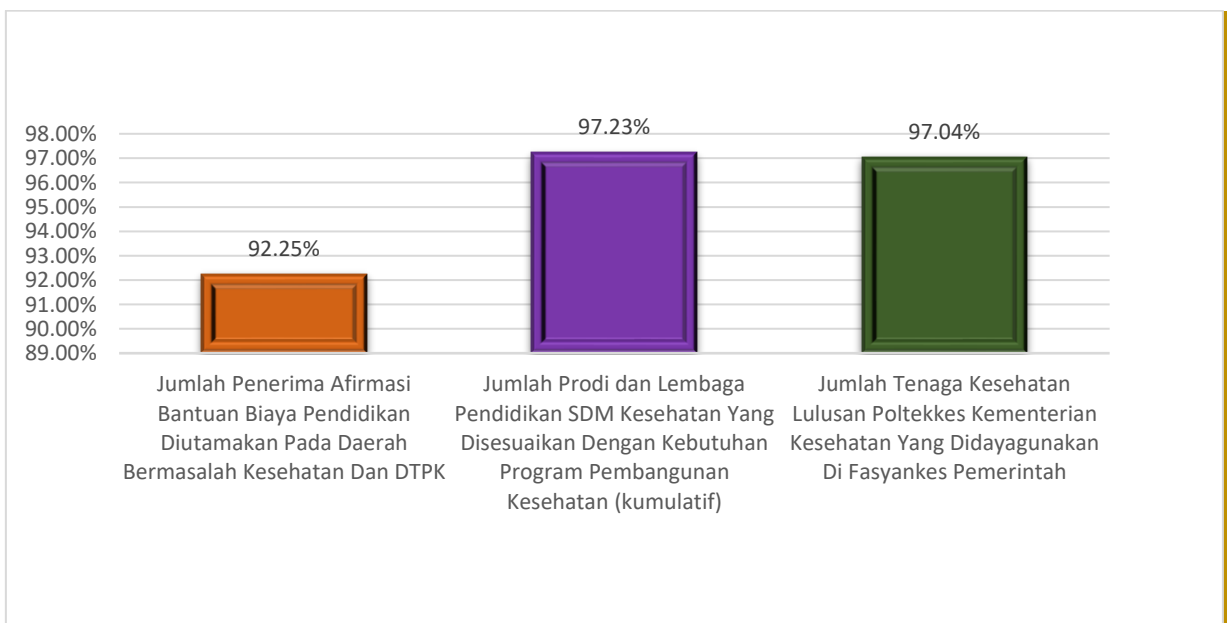
- Dukungan Manajemen dengan realisasi Rp 5.230.899.692 (95,11%) dari alokasi 5.499.939.000.

Grafik 4. Alokasi dan Realisasi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan T.A 2021



Alokasi dan Realisasi Berdasarkan Indikator Pusdik SDM Kesehatan pada T.A 2021 berdasarkan Indikator Kinerja dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 5. Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan T.A 2021



Berdasarkan grafik 5 alokasi dan realisasi berdasarkan Indikator Pusdik SDM Kesehatan pada T.A 2021, untuk indikator penyerapan yang tertinggi pada indikator jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan yang di sesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan sebesar 97,23%. Alokasi pada indikator ini sebesar Rp 42.552.950.000 dengan realisasi sebesar Rp 41. 376.180.017 (97,23%).

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator penyesuaian prodi dan lembaga Pendidikan SDM Kesehatan yang di sesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan sudah tercapai melebihi 100% yaitu 132,69%. Jika dilihat dari capaian kinerja tertinggi terdapat pada capaian indikator jumlah penerima afirmasi bantuan biaya Pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK sebesar 162,8% dengan realisasi anggaran sebesar 92,25%. Rata- rata pencapaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan sebesar 149,43% dengan rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 96,13%. Capaian tersebut didukung juga dari realokasi ke Poltekkes Kemenkes. Artinya terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran jika dibandingkan antara pencapaian kinerja dan realisasi anggaran. Pencapaian tersebut juga di dukung oleh jumlah SDM sebanyak 70 orang termasuk honorer, penyediaan sarana dan prasarana di Pusdik SDM Kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan Kesehatan, 3) Sumber Daya Manusia Kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 5) Manajemen dan Informasi Kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat Kerjasama dan kemitraan lintas sectoral. Penekanannya pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

Kementerian Kesehatan menyusun arah kebijakan dan strategi untuk turut mendukung pencapaian program pembangunan kesehatan. Badan PPSDMK berupaya mendukung arah, kebijakan dan strategi dalam meningkatkan ketersediaan dan pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai kompetensi dan standar. Sasaran utama dalam rangka pemenuhan tenaga kesehatan baik jumlah, jenis dan kualitas dengan strategi pendekatan distribusi tenaga kesehatan. Sesuai tugas dan fungsi Badan PPSDMK yaitu melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan (Permenkes Nomor 25 tahun 2020). Sasaran strategis Badan PPSDMK yang akan di capai dalam pelaksanaan programnya yaitu 1) Puskesmas tanpa dokter 0%, 2) terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 83%, 3) terpenuhinya RSUD Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis lainnya sebesar 90%, 4) tersedianya SDM kesehatan yang di tingkatkan kompetensinya sebanyak 167.742 orang.

Dalam mendukung sasaran Badan PPSDMK tersebut, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan sumber daya manusia kesehatan (Permenkes Nomor 25 tahun 2020) merumuskan sasaran dan indikator kinerja yaitu: 1) Penyediaan bantuan biaya Pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK, 2) Penyesuaian prodi dan lembaga Pendidikan SDM kesehatan. 3) Iulusan Poltekkes Kemenkes yang di dayagunakan di fasyankes Pemerintah.

Laporan kinerja ini disusun mengacu kepada Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Pusdik SDM Kesehatan kepada Badan PPSDMK berdasarkan kesepakatan perjanjian kinerja pada tahun 2021. Laporan kinerja memberikan informasi atas keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan program dan anggaran Pusdik SDM Kesehatan pada periode tahun 2020-2024.

B. ISU STRATEGIS

Masih belum merata dan tersedianya tenaga kesehatan di semua fasyankes merupakan salah satu issue yang belum terselesaikan hingga saat ini terutama di wilayah bermasalah kesehatan dan DTPK. Badan PPSDMK terus berupaya untuk dapat menyediakan tenaga kesehatan melalui sasaran strategis nya yaitu : 1) Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2) Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3) Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 4) Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, 5) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, 6) Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan, 7) Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, 8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program.

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan (Permenkes Nomor 25 Tahun 2020). Pusat Pendidikan SDM Kesehatan melaksanakan sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan nomor 4 (empat) yaitu tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya.

Dalam mendukung penyediaan SDM Kesehatan yang di tingkatkan kompetensinya, Pusdik SDM Kesehatan sebagai unit pembina teknis Poltekkes Kemenkes dimana Poltekkes Kemenkes melakukan penyelenggaraan Pendidikan untuk mengadakan SDM kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 18 menyebutkan bahwa pembinaan teknis pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan pembinaan akademik pendidikan bidang kesehatan dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sehingga Badan PPSDM Kesehatan melalui Pusdik SDM Kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap institusi penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan.

Beberapa permasalahan, gambaran kondisi umum, potensi bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan terdapat beberapa issue yang dapat menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran strategi Pusdik SDM Kesehatan.

1. Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan

Kondisi SDM Kesehatan saat ini terus membaik dalam jumlah, kualitas dan penyebarannya, namun belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan komposisi jenis tenaga yang belum berimbang masih menjadi permasalahan dalam memenuhi standar tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai Permenkes 75 tahun 2014. Adapun 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar adalah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan ahli teknologi laboratorium medik.

Data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Badan PPSDM Kesehatan terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar sebanyak 3.965 dari 10.230 Puskesmas (38,76 %). Disisi lain data mahasiswa kesehatan berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Tahun 2019, saat ini jumlah mahasiswa bidang kesehatan ada sebanyak 532.935 orang yang berasal dari 3.640 prodi bidang kesehatan. Dimana nantinya mahasiswa tersebut akan menjadi tenaga kesehatan yang berpotensi untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas dan fasyankes lainnya.

Saat ini jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan di seluruh Indonesia sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dikelompokkan sebagai berikut: a) tenaga medis: dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, b) tenaga psikologis klinis: c) tenaga keperawatan: berbagai jenis perawat; (keperawatan gigi dihapus karena nomenklaturnya udah kesehatan gigi (DIII), terapi gigi (DIV) d) tenaga kebidanan: bidan; e) tenaga kefarmasian: apoteker, tenaga teknis kefarmasian (kalau dari UU), farmasi, analisa farmasi dan makanan; f) tenaga kesehatan masyarakat: tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, epidemiolog kesehatan, tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga, tenaga biostatistik dan kependudukan, dan tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;

g) tenaga gizi: nutrisisionis dan dietisien; h) tenaga kesehatan lingkungan: sanitasi lingkungan, entemolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan; i) tenaga keterampilan fisik: fisioterapi, okupasi terapi, terapis wicara, akupunktur; j) tenaga keteknisian medis: perekam medis dan informasi kesehatan, teknik gigi, penata anastesi, terapis gigi dan mulut, teknisi pelayanan darah; k) tenaga teknik biomedika: radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, radioterapis, fisikawan medis dan ortotik prosetetik; l) tenaga kesehatan tradisional: jamu; m) tenaga kesehatan lain.

Dari pengelompokkan tenaga kesehatan di atas, jenis pendidikan tenaga kesehatan yang diselenggarakan di 38 Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia sebanyak 21 jenis yang tersebar di 493 prodi (D-III : 290, D-IV/Sarjana Terapan : 150, D-III PJJ : 4, Profesi : 45, S2 Terapan : 4) dengan jumlah mahasiswa sebanyak 101.585 orang dan lulusan yang dihasilkan dari Poltekkes Kemenkes pada tahun 2019 sebanyak 37.725 orang (data per 31 Desember 2019).

Berdasarkan data di atas, terdapat permasalahan pendidikan tenaga kesehatan yaitu masih kurang serasinya antara kebutuhan tenaga kesehatan di fasyankes dengan pengadaan jenis pendidikan tenaga kesehatan di institusi pendidikan bidang kesehatan. Sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi jenis penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan yang akan dikembangkan dengan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, agar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dapat terlaksana sesuai standar.

2. Kemitraan dan Kerjasama Pendidikan SDM Kesehatan

Dalam rangka pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat dan tidak hanya arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

Kementerian Kesehatan telah melaksanakan perjanjian kerjasama antar negara di ASEAN dalam hal pengiriman tenaga kesehatan, seperti pengiriman perawat ke Jepang atau Korea untuk penempatan di RS dan panti jompo. Selain untuk Negara ASEAN, permintaan

pengiriman tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri cukup banyak antara lain Timur Tengah, Amerika, Eropa, Australia, dan lain-lain.

Menindaklanjuti hal di atas, Pusdik SDM Kesehatan sebagai pembina teknis Poltekkes Kemenkes dalam penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan telah memfasilitasi kerjasama Poltekkes Kemenkes dengan mitra baik di dalam maupun di luar negeri, untuk bidang pertukaran dosen dan mahasiswa ke luar negeri, penelitian dalam dan luar negeri, pengembangan kurikulum kelas internasional, akreditasi internasional, magang dosen dan mahasiswa dalam dan luar negeri dan lain-lain.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di dalam dan luar negeri diperlukan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang berkualitas, khususnya di Poltekkes Kemenkes masih terdapat disparitas yang tinggi dari segi kualitas pendidikan kesehatan. Disparitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen, sumber daya manusia, kurikulum, proses belajar-mengajar, sampai sumber daya pendukung. Penyelesaian permasalahan disparitas kualitas pendidikan tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan SDM Kesehatan yang profesional memerlukan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak.

3. Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan (Teknis dan Penunjang Pendidikan)

Dalam mendukung tri dharma Perguruan Tinggi Pendidikan SDM Kesehatan, untuk meningkatkan kualitas lulusan diperlukan dukungan sarana dan prasarana termasuk sarana penunjang Pendidikan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi issue penting dalam penyesuaian ke kurikulum Pendidikan. Kurikulum merupakan hal yang mendasar dan penting sebagai acuan bagi institusi pendidikan tenaga kesehatan dalam menjalankan proses belajar mengajar, selain itu kurikulum dalam proses pendidikan sangat diperlukan sebagai pedoman dan arah dalam interaksi antar seluruh elemen dalam proses belajar mengajar sehingga dapat dicapai kualitas lulusan yang handal dan profesional untuk menjawab tantangan di atas.

Namun, belum seluruh kurikulum disesuaikan dengan kurikulum pendidikan tinggi (KPT) yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Karena sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI dan dikokohkan dengan dicantumkannya KKNI dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, maka kurikulum

pendidikan tinggi di Indonesia menyesuaikan dalam penyusunannya dengan pola pikir yang berkembang saat ini.

Pusdik SDM Kesehatan telah melakukan fasilitasi penyiapan bahan kurikulum untuk 20 jenis prodi DIII, 16 jenis prodi DIV, 4 jenis Profesi, dan 4 jenis Prodi Magister Terapan. Proses Penyusunan kurikulum di Pusdik SDM Kesehatan berlangsung siklus maksimal 5 tahunan, dimana tahun ke-5 dilakukan revisi kurikulum untuk menjawab perkembangan IPTEKS, perubahan regulasi dan kebutuhan program Kemenkes. Kegiatan penyiapan bahan kurikulum ini akan menghasilkan kurikulum inti yang menjadi acuan bagi institusi pendidikan dalam mengembangkan kurikulum institusi. Dengan demikian, setiap lulusan pendidikan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia akan memiliki kompetensi inti yang sama sehingga berdampak pada meningkatnya pembangunan kesehatan di Indonesia.

Dharma lainnya dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi adalah kegiatan penelitian bagi dosen yang merupakan hal penting untuk menciptakan inovasi serta memenuhi tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya khususnya di bidang kesehatan guna meningkatkan pembangunan kesehatan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.

Pelaksanaan penelitian yang berkualitas menghasilkan produk-produk inovasi dan respon terhadap kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan publikasi penelitian dosen pada jurnal nasional dan internasional yang bereputasi masih sangat sedikit, yaitu berdasarkan data Kemenristek Dikti melalui aplikasi SINTA (*Science and Technology Index*) merupakan portal berisi pengukuran kinerja IPTEK dari peneliti, penulis, kinerja jurnal, kinerja institusi dalam penelitian, Poltekkes Kemenkes masih menduduki posisi peringkat tertinggi yaitu rangking 180 secara nasional dan posisi terendah yaitu rangking 3.275 secara nasional

Pengabdian masyarakat bagi dosen di institusi pendidikan tinggi juga masih harus dikembangkan dalam upaya melakukan pengabdian masyarakat yang inovatif dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Selain dosen, mahasiswa dituntut dapat ikut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan mendiseminasikan hasil pengabmas.

Selain itu, tantangan dunia pendidikan tinggi di Indonesia pada era industri 4.0 dituntut untuk dapat mengatasi gejolak perubahan yang terjadi dikarenakan transformasi digital. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pilar dalam perguruan tinggi memegang

peranan strategis dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan siap berkompetisi di era industri 4.0. Dengan demikian, pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi inti keilmuan (*core competencies*) yang kuat, memiliki *soft skill*, kreatif, komunikatif

4. Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan SDM Kesehatan

Sebagai upaya untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang berkualitas, bertanggung jawab, memiliki etika, moral yang tinggi, keahlian dan memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan serta siap melaksanakan pembangunan kesehatan diperlukan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPMPT) yang merupakan sistem untuk meningkatkan mutu institusi pendidikan secara berencana dan berkelanjutan, melalui sistem penjaminan mutu internal, pangkalan data perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal (akreditasi)

Akreditasi sendiri bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi (prodi) dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi serta menjamin prodi dan perguruan tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat sesuai dengan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi.

Data akreditasi prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes per 31 Desember 2019 yaitu sebanyak 60 prodi terakreditasi A (13,92%), 352 prodi terakreditasi B (81,67%), 33 institusi terakreditasi B sehingga total Prodi dan Institusi yang terakreditasi minimal B sebanyak 445 Prodi dan Institusi. Namun, masih terdapat 19 prodi terakreditasi C (4,4%) dan 5 Poltekkes Kemenkes dalam proses akreditasi yaitu Poltekkes Kemenkes; Pangkal Pinang, Mamuju, Maluku, Sorong, dan Ternate. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat prodi yang habis masa berlaku sebanyak 166 prodi (D-III : 107 prodi, D-IV : 59 prodi), prodi baru sebanyak 2 prodi dan 3 akreditasi institusi.

Disisi lain, pada tahun 2020 ini mulai diterapkan akreditasi 9 kriteria pertanggal 1 Januari 2020 sesuai dengan Surat Pengumuman Ketua LAM-PTKes Nomor 0250/SKU/K/03.2019 tanggal 13 Maret 2019 yang berarti bahwa akan ada penambahan

penilaian semula 7 kriteria menjadi 9 kriteria bagi prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes. Untuk itu diperlukan upaya bagi prodi terakreditasi C, prodi yang habis masa berlaku, prodi baru dan institusi yang akan diakreditasi dalam membudayakan mutu dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu Pusdik SDM Kesehatan sudah melakukan pemetaan bagi prodi maupun institusi yang berpotensi untuk ditingkatkan akreditasinya dari peringkat B ke A bahkan akreditasi internasional masih memerlukan fasilitasi dan pemantapan agar meningkat hasil akreditasinya.

Sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan selain pelaksanaan akreditasi di atas, kegiatan pengendalian mutu pendidikan perlu dilakukan melalui pemantauan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. Pemantauan yang dimaksud adalah suatu proses sistematis yang diselenggarakan untuk mencapai keberhasilan suatu penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Untuk itu pemantauan dilakukan terhadap kualitas masukan (input), kualitas proses maupun kualitas hasil pelaksanaan (output).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2021, merupakan wujud akuntabilitas entitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pendidikan SDM Kesehatan atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021. Maksud dari penyusunan LKj tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pusdik SDM Kesehatan;
- 2) Umpan balik peningkatan kinerja Pusdik SDM Kesehatan;
- 3) Meningkatkan perencanaan program, kegiatan dan perencanaan organisasi Pusdik SDM Kesehatan;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pusdik SDM Kesehatan;
- 5) Memberikan pemahaman dan penilaian pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pusdik SDM Kesehatan;
- 6) Mendorong pelaksanaan program kegiatan dan anggaran lebih akuntabel, efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Tujuan penyusunan laporan kinerja untuk mengungkapkan sebab akibat akuntabilitas hasil analisis dari pengukuran kinerja. Selain tujuan tersebut untuk :

- 1) Menjelaskan hasil dari kinerja yang telah ditetapkan Pusdik SDM Kesehatan
- 2) Mengevaluasi perencanaan program, kegiatan dan perencanaan organisasi Pusdik SDM Kesehatan.
- 3) Menjelaskan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pusdik SDM Kesehatan
- 4) Menjelaskan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pusdik SDM Kesehatan
- 5) Menjelaskan kinerja yang lebih akuntabel, agar penyelenggaraan organisasi lebih efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.

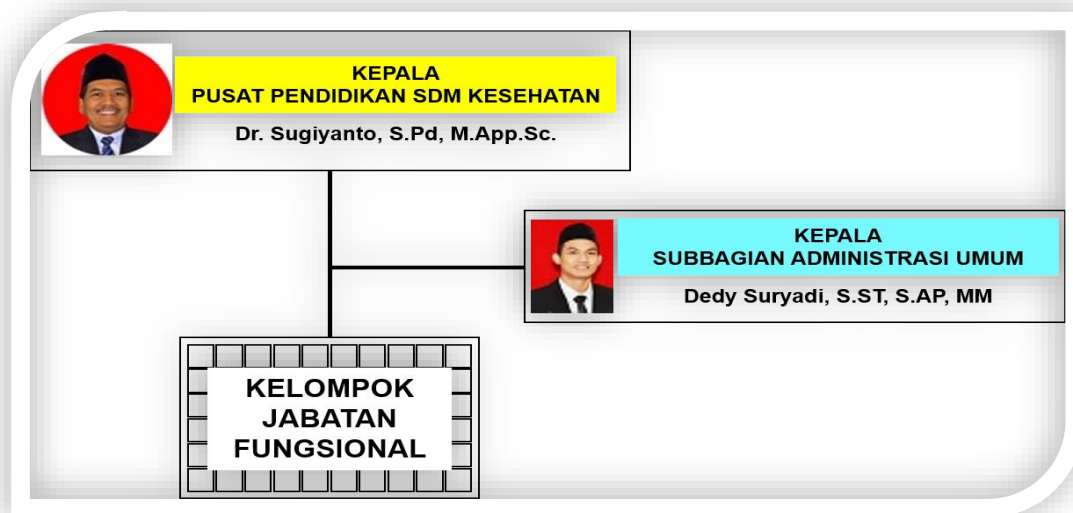
D. ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 2 Oktober 2020. Dalam Bab X bagian kelima pasal 223 Pusdik SDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
2. Pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Susunan Organisasi Pusdik SDM Kesehatan digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Susunan Organisasi Pusdik SDM Kesehatan



E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan LKj Pusdik SDM Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan perihal latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan pelaporan, visi dan misi, susunan organisasi dan tata laksana Pusdik SDM Kesehatan serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan perencanaan dan perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan dalam bentuk tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target sesuai dengan Kebijakan dan Program Pusdik SDM Kesehatan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pusdik SDM Kesehatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pusdik SDM Kesehatan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusdik SDM Kesehatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. ARAH KEBIJAKAN

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 18 tahun 2020 yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotive dan preventif dan didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Dalam mendukung pemerintah Kementerian Kesehatan telah menetapkan 5 (lima) fokus prioritas strategi pembangunan untuk 5 tahun ke depan yaitu kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan penguatan sistem kesehatan serta pengawasan obat dan makanan.

Selain itu, stunting dan adanya kasus covid yang mewabah di seluruh dunia termasuk Indonesia turut menjadi perhatian utama Kementerian Kesehatan, sehingga ditetapkan sasaran pokok pembangunan kesehatan pada RPJMN tahun 2020- 2024 yaitu :

- a) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi
- b) Percepatan Perbaikan Gizi
- c) Peningkatan Pengendalian Penyakit
- d) Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- e) Penguatan Sistem Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari tersedianya SDM Kesehatan yang berkualitas. Permasalahan dalam penyediaan SDM Kesehatan terutama tenaga kesehatan yaitu kurang meratanya distribusi nakes di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan dan Bermasalah Kesehatan (DTPK/DBK). Terdapat 6 pilar transformasi, salah satu nya adalah transformasi SDM Kesehatan yaitu Mempercepat ketersediaan, kualitas dan distribusi SDM bidang kesehatan lintas sistem kesehatan. Ada beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi dan menjadi isu strategis diantaranya :

- a) Ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas dan memadai menjadi salah satu faktor pendukung dalam percepatan pencapaian derajat kesehatan masyarakat dan upaya dalam mendukung tercapainya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- b) Dukungan kebijakan dan regulasi perlu diintegrasikan dan diperkuat
- c) Penguatan dan optimalisasi dalam pelaksanaan penugasan khusus tenaga kesehatan di Puskesmas
- d) Penguatan koordinasi dan lintas sektor dan program dengan para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah
- e) Penguatan Komitmen antara pusat dan daerah serta penyediaan dukungan sarana dan prasarana serta pemberian insentif yang memadai terutama untuk penempatan nakes di DTPK.
- f) Penguatan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di seluruh fasyankes.

Dalam rangka menjawab isu tersebut, salah satu arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan adalah Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mendorong pencapaian tersebut diperlukan penguatan tenaga kesehatan yang unggul dan mumpuni. Dalam mendukung tujuan tersebut, arah kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan melalui pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang berfokus pada :

- 1) Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati
- 2) Redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di Puskesmas dan RS di Tingkat Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota yang didukung penyediaan insentif finansial dan non finansial
- 3) Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak pelayanan
- 4) Perluasan pelatihan tenaga kesehatan focus pada pelayanan kesehatan dasar, peningkatan mutu program studi bidang kesehatan sesuai kebutuhan
- 5) Pemenuhan tenaga kesehatan puskesmas sesuai standar dan non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas Kesehatan.

B. SASARAN STRATEGI

Sasaran strategi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dalam mendukung penyiapan ketersediaan tenaga kesehatan melalui penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan. Untuk mendukung kebijakan dan strategi BPPSDMK, Pusdik SDM Kesehatan memiliki sasaran program dan Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2020 -2024 yaitu :

Tabel 2. 1

Sasaran Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020-2024

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)/PROYEK	INDIKATOR	TARGET					SATUAN	LOKASI
		2020	2021	2022	2023	2024		
PP : Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan								
KP : Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan								
ProP : Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan								
Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	0	500	1000	1500	1500	Orang	Pusat dan Poltekkes Kemenkes
Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	52	104	156	208	260	Prodi dan Lembaga	Pusat dan Poltekkes Kemenkes

Tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes pemerintah	Jumlah Tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes Pemerintah		500	1.000	1.500	1.500	orang	Poltekkes Kemenkes
--	---	--	-----	-------	-------	-------	-------	--------------------

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusdik SDM Kesehatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2021 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) tahun 2021 terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	500 orang
Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif)	104 prodi dan lembaga
Tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes pemerintah	Jumlah Tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes Pemerintah	500 orang

C. PERJANJIAN KINERJA

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja disusun sebagai pernyataan komitmen pimpinan atas janji dan tekad untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	500 orang
Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif)	104 prodi dan lembaga
Tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes pemerintah	Jumlah Tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes Pemerintah	500 orang

Perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan tahun 2021 terjadi penambahan indikator kinerja jumlah tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes Pemerintah, indikator tersebut pemberian/*given* dari Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan. Alasan indikator tersebut di pindahkan karena pembinaan Poltekkes Kemenkes secara teknis berada di bawah Pusdik SDM Kesehatan.

D. PEMBIAYAAN

Penetapan Alokasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp 82.959.075.000 yang terbagi menjadi kegiatan Pusdik SDM Kesehatan sebesar Rp 77.531.622.000 dan dukungan manajemen sebesar Rp 5.427.453.000. Namun dari alokasi Pusdik SDM Kesehatan (2077) yang menjadi kegiatan Pusdik SDM Kesehatan sebesar Rp 69.023.865.000 dan dialokasikan ke Poltekkes Kemenkes sebesar Rp 13.938.210.000. Adanya kebijakan efisiensi/realokasi/refocusing dan termasuk dalam anggaran penanganan covid-19 menyebabkan anggaran Pusdik SDM Kesehatan sampai saat ini mengalami 9 (Sembilan) kali revisi DIPA dan 5 (lima) kali Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), sehingga alokasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan sebesar Rp 60.840.729.000. dimana kegiatan Pusdik SDM Kesehatan (2077) Rp 42.284.091.000, realokasi Poltekkes Rp 12.556.638.000 dan Dukungan Manajemen Rp 5.499.939.000. Realokasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan ke Poltekkes Kemenkes untuk program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (PADINAKES) dan Pengabdian Masyarakat Unggulan.

Tabel 2. 4 Perubahan Alokasi dan Realokasi Pusdik SDM Kesehatan tahun 2021

KEGIATAN	DIPA AWAL	DIPA SAMPAI DESEMBER
Total Anggaran	Rp 82.959.075.000	Rp 60.840.729.000
Pusdik SDM Kesehatan (2077+ Poltekkes)	Rp 77.531.622.000	Rp 55.340.790.000
Pusdik SDM Kesehatan (2077+4817)	Rp 69.023.865.000	Rp 48.284.091.000
Pusdik SDM Kesehatan (2077)	Rp 63.596.412.000	Rp 42.784.152.000
Dukungan Manajemen (4817)	Rp 5.427.453.000	Rp 5.499.939.000
Realokasi Poltekkes Kemenkes (2077)	Rp 13.935.210.000	Rp 12.556.638.000

Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Dalam Mendukung Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Alokasi Anggaran
1	Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan Dan DTPK	12,210,925,000
2	Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan (kumulatif)	42,552,950,000
3	Jumlah Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan Yang Didayagunakan Di Fasyankes Pemerintah	576,915,000
Pusdik SDM Kesehatan		55,340,790,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pusdik SDM Kesehatan tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang berisikan capaian kinerja atas target kinerja dan anggaran yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian pada tahun 2021

A. CAPAIAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN TAHUN 2021

Dalam mengukur capaian kinerja, tentunya telah dilakukan perencanaan kinerja yang telah di tuangkan dalam kertas kerja sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Matrik Kertas Kerja Indikator Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	IKK	TARGET					DO	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024			
1	Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	0	500	1,000	1,500	1,500	Jumlah penerima bantuan biaya pendidikan afirmasi diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah peserta penerima bantuan biaya pendidikan afirmasi diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	SK penerima bantuan biaya pendidikan sesuai dengan hasil seleksi
2	Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah Prodi dan lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Program Pembangunan Kesehatan*(kumulatif)	52	104	156	208	260	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan yang disesuaikan baik secara kuantitas dan kualitas dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan yang disesuaikan baik secara kuantitas dan kualitas dengan kebutuhan program pembangunan	Surat rekomendasi penyesuaian prodi, SK Pendirian Prodi , Hasil Penilaian Akreditasi, SK Pengembangan PUL-PK, SK Kelas Internasional

kesehatan
- Penyesuaian secara kuantitas berupa penambahan (jumlah dan jenis) program studi, pembatasan kuota penerimaan mahasiswa baru, pembatasan pembukaan program studi baru, serta penutupan program studi yang sudah jenuh, disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan.
- Penyesuaian secara kualitas dilakukan dengan cara mendorong perguruan tinggi bidang kesehatan dan program studi di dalamnya untuk meningkatkan status akreditasinya khususnya untuk mencapai akreditasi unggul; pengembangan Pusat Unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK), pengembangan kelas Internasional (RKI)

3	Pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes pemerintah	0	500	1,000	1,500	1,500	Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kemenkes RI yang telah bekerja dan di dayagunakan di Fasyankes pemerintah yang sudah PNS,PPPK maupun pegawai BLU, penugasan khusus, dan pola lainnya	Menghitung Tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kemenkes RI yang telah bekerja dan didayagunakan di Fasyankes (PNS,PPPK, BLU, penugasan khusus, dan pola lainnya)	Poltekkes dan Pusdik SDM (data tracer study)

Capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2021

Indikator	Target	Capaian
Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	500 orang	814 orang (162,8%)
Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif)	104 prodi dan lembaga	138 prodi dan lembaga (132,69%)
Jumlah Tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes Pemerintah	500 orang	764 orang (152,8%)

Indikator 1 : >> Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK

Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (**PADINAKES**) adalah program keberpihakan pemerintah yang diatur secara khusus untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada siswa lulusan SMA sederajat yang berasal Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan beberapa wilayah tertentu dengan permasalahan kesehatan dan/atau mahasiswa pada tahun terakhir yang akan ditempatkan di DTPK dan daerah dengan permasalahan kesehatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Program ini dimaksudkan untuk pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mengatasi kekurangan jenis tenaga kesehatan dan tidak meratanya distribusi dan meningkatkan retensi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan. Dalam Permenkes Nomor 27 tahun 2021 program afirmasi Padinakes pada pasal 9 untuk calon peserta dapat berasal dari lulusan SMA atau sederajat atau mahasiswa tingkat akhir pada Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes.

Pada tahun 2021 ini terdapat 17 Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan program Afirmasi PADINAKES. Terpilihnya 17 Poltekkes tersebut didasarkan pada wilayah yang memiliki DTPK atau DBK dan rendahnya ketersediaan tenaga kesehatan dan juga mempertimbangkan status akreditasi Poltekkes Kemenkes. Poltekkes Kemenkes sendiri memiliki Program Studi di luar Kampus Utama (PSDKU) sebanyak 120 program studi dari 506 prodi secara keseluruhan dan 90% nya berada di DTPK, Kabupaten/kota di Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, di Aceh, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, NTT, NTB, Sumut.

Capaian indikator penerima afirmasi pada tahun 2021 telah tercapai sebanyak 814 orang (162,8%), telah dilakukan penetapan peserta mahasiswa di 17 Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan program afirmasi pada tanggal 19 November 2021 melalui SK Kaban PPSDMK Nomor HK. 02.02/III/13963/2021 tentang Peserta Penerima Bantuan Dana Pendidikan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan tahun 2021.

Tabel 3. 3 Target dan Capaian Penerima Bantuan Afirmasi PADINAKES Tahun 2021

NO	POLTEKKES	TARGET	CAPAIAN
1	Poltekkes Denpasar	20	19
2	Poltekkes Jakarta III	30	30
3	Poltekkes Bandung	30	30
4	Poltekkes Tasikmalaya	45	45
5	Poltekkes Semarang	55	55
6	Poltekkes Yogyakarta	30	30
7	Poltekkes Pontianak	81	82
8	Poltekkes Makassar	51	51
9	Poltekkes Bengkulu	50	50
10	Poltekkes Malang	30	30
11	Poltekkes Surabaya	30	30
12	Poltekkes Mataram	24	24
13	Poltekkes Manado	35	35
14	Poltekkes Kupang	88	88
15	Poltekkes Maluku	98	98
16	Poltekkes Aceh	65	65
17	Poltekkes Jayapura	52	52
JUMLAH		814	814

Indikator 2 : >> Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif)

Indikator jumlah prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan dimaksudkan untuk pengembangan Poltekkes Kemenkes dalam menyesuaikan prodi-prodi untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan Kesehatan khususnya di bidang Kesehatan. Saat ini terdapat 38 Poltekkes dan 507 prodi dengan 24 jenis tenaga kesehatan. Diharapkan program studi di Poltekkes dapat menghasilkan tenaga Kesehatan yang betul dapat memberikan kontribusi untuk

pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia. Dirumuskan indikator ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap pengembangan prodi dengan menyesuaikan dengan kebutuhan program bidang kesehatan termasuk dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seiring perkembangan dunia Pendidikan kesehatan dan ilmu teknologi Poltekkes Kemenkes juga harus mampu mengikuti dan melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap hal tersebut. Dalam hal tersebut Pusdik SDM Kesehatan memberikan rekomendasi atas pembukaan prodi baru yang memang dibutuhkan masyarakat termasuk prodi yang belum ada atau prodi langka namun memang dibutuhkan. Pemberian rekomendasi tersebut tentunya melalui telaahan dokumen usulan pendirian prodi yang telah diajukan oleh Poltekkes yang kemudian akan diteruskan ke Kemendikbudristek oleh Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.

Capaian prodi dan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan sebanyak 138 (132,6%) prodi dan lembaga. Penyesuaian prodi tersebut dilakukan dengan kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas penyesuaian prodi dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- Rintisan Kelas Internasional (RKI). Poltekkes yang sudah dianggap mampu di dorong untuk melakukan penyiapan RKI untuk menyambut transformasi revolusi industri Pendidikan 4.0. Prodi yang didorong untuk RKI yang sudah berstatus akreditasi A. Saat ini sudah ada 10 Poltekkes diantaranya Poltekkes Padang, Tasikmalaya, Surabaya, Manado, Kupang, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jakarta 1, Banten, dan Mataram.
- Akreditasi Prodi. Akreditasi prodi terus di dorong minimal B, namun yang sudah B akan di dorong mendapatkan akreditasi A. Dalam pemenuhan akreditasi tersebut tentunya harus dilakukan penguatan dan penatalaksanaan baik dari segi sarana prasarana, SDM dan termasuk pembiayaan. Pada tahun 2021 sebanyak 25 prodi yang meningkat status akreditasinya.
- Pengembangan Poltekkes Kemenkes untuk menciptakan pusat unggulan IPTEKS (PUI-PK). Saat ini sudah terdapat 9 Poltekkes Kemenkes yang sudah dikembangkan menjadi pusat ipteks di masing-masing keunggulan. Pada tahun 2021 terdapat 5 PUI Poltekkes Kemenkes diantara PUI-PK Medan, Surakarta, Padang, Jakarta II dan Manado). Harapannya Poltekkes Kemenkes nantinya dapat menjadi pusat unggulan nasional.

Penyesuaian secara kuantitas dicapai melalui rekomendasi pembukaan dan penutupan prodi :

- Pada tahun 2021 terdapat 9 rekomendasi yang diberikan diantaranya D3 Sanitasi Banten, Sarjana Terapan Promkes Banten, Sarjana Terapan TLM Banten, D3 Sanitasi Palangka Raya, Sarjana Terapan Promkes Palangka Raya, Profesi bidan jayapura, Sarjana Terapan gizi Jambi, Profesi bidan kupang. Adanya kebijakan RPPTKL berdampak pada pembukaan/ penutupan prodi di moratorium, sehingga beberapa Poltekkes yang telah mengusulkan pembukaan prodi baru jadi terhambat.

Indikator 3 : >> Jumlah Tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes Pemerintah



Poltekkes Kemenkes merupakan unit pelaksana teknis Kemenkes di bidang penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan. Kehadiran Poltekkes Kemenkes di harapkan dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan di bidang Kesehatan. Lulusan Poltekkes diharapkan dapat mengisi lokus-lokus layanan kesehatan yang kurang ataupun yang masih kosong terutama di fasyankes pemerintah baik Pusat, Daerah, TNI/Polri dan instansi kesehatan lainnya.

Capaian lulusan Poltekkes Kemenkes yang bekerja di fasyankes pemerintah di tahun 2021 sebanyak 764 (152,8%) orang. Capaian tersebut di capai melalui:

- Program Nusantara Sehat (NS) orang yang tersebar di seluruh Indonesia,
- Pegawai honorer/Pemda/PNS dan TNI/Polri.

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN SDM Kesehatan TAHUN 2020 DAN 2021

Evaluasi target dan capaian tahunan perlu dilakukan untuk mengetahui kegagalan ataupun keberhasilan sebuah program. Untuk mengetahui progress kemajuan program tersebut perlu dilakukan perbandingan atas capaian di setiap tahunnya agar dapat

memberikan input/ masukan untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik lagi pada tahun selanjutnya.

Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2021

(Sandangan Renja K/L dan Perjanjian Kinerja)

Indikator	2020		2021	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	0	0	500 orang	184 orang (162,8%)
Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif)	52 prodi dan lembaga	89 prodi dan lembaga (171,15%)	104 prodi dan lembaga	138 prodi dan lembaga (132,69%)
Jumlah Tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes Pemerintah			500 orang	764 orang (152,8%)

Pada tahun 2020, Pusdik SDM Kesehatan memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK dan Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan Kesehatan.

Pada tahun 2021 indikator kinerja Pusdik SDM Kesehatan bertambah 1 (satu) menjadi 3 (tiga) indikator yaitu Jumlah Tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes Pemerintah. Indikator Jumlah Tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes Pemerintah merupakan indikator *given* dari Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, karena

indikator kinerja ini mencerminkan teknis pelaksanaan Pendidikan dan Pusdik SDM Kesehatan merupakan pembina teknis Poltekkes Kemenkes.

Indikator I	Jumlah Penerima Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK
------------------------	---

Masih kurangnya ketersediaan tenaga Kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah Kesehatan menjadi dorongan pemerintah dalam pemenuhan nakes tersebut. Badan PPSDMK mempunyai tugas dalam hal pemenuhan tenaga kesehatan baik dalam jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan. Pusdik SDM Kesehatan merupakan Satker unit eselon II yang berperan dalam perumusan kebijakan, standar dan evaluasi terhadap penyediaan tenaga kesehatan yang mempunyai tugas memfasilitasi kebijakan dalam mengadakan tenaga kesehatan. Salah satu yang menjadi strategi adalah menyediakan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang berasal dari daerah DTPK atau DBK. Pada tahun 2020 isu strategis tersebut dirumuskan menjadi indikator Pusdik SDM Kesehatan yang merupakan unit Pembina teknis Poltekkes Kemenkes. Poltekkes Kemenkes sebagai unit penyelenggara Pendidikan yang mempunyai tugas penyediaan tenaga Kesehatan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan tenaga kesehatan di daerah DTPK dan DBK. Pada tahun 2020 target indikator ini 0 (nol) dikarenakan indikator penerima Afiriasi bantuan biaya Pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah Kesehatan dan DTPK merupakan indikator baru sehingga pada tahun 2020 dilakukan untuk penyiapan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK). Regulasi/ kebijakan yang disiapkan meliputi Peraturan Menteri Kesehatan, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Afiriasi, Petunjuk Teknis Pembiayaan Program Afiriasi Pendidikan tenaga Kesehatan dan Juknis Rekrutmen Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Pada tahun 2021 target indikator ini ditetapkan 500 orang penerima bantuan Pendidikan yang tersebar di 17 Poltekkes Kemenkes yaitu Poltekkes Kemenkes Denpasar, Poltekkes Kemenkes Jakarta III, Poltekkes Kemenkes Bandung, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Poltekkes Semarang, Poltekkes Kemenkes

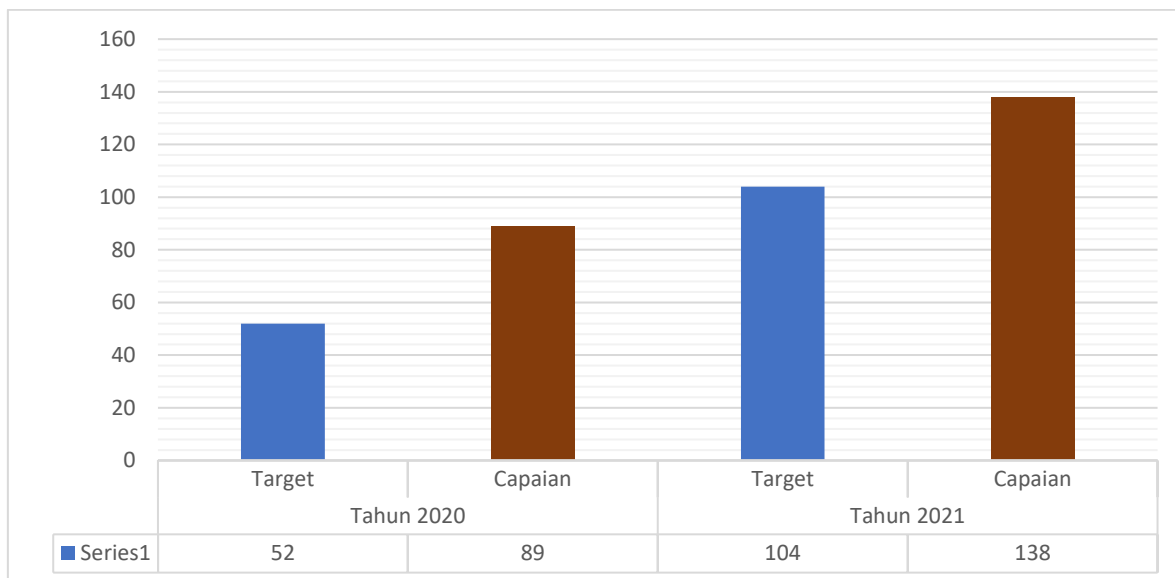
Yogyakarta, Poltekkes Kemenkes Pontianak, Poltekkes Kemenkes Makassar, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Poltekkes Kemenkes Malang, Poltekkes Kemenkes Surabaya, Poltekkes Kemenkes Mataram, Poltekkes Kemenkes Manado, Poltekkes Kemenkes Kupang, Poltekkes Kemenkes Maluku, Poltekkes Kemenkes Aceh dan Poltekkes Kemenkes Jayapura.

Capaian indikator program Afirmasi Padinakes tahun 2021 tercapai sebanyak 184 (162,8%) orang. Permenkes tentang program Afirmasi Nomor 27 tahun 2021 baru ditetapkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 21 September Tahun 2021 dan kemudian dilakukan penyusunan pedoman/ juknis penyelenggaraan Pendidikan program afirmasi, rekrutmen dan juknis pembiayaan. Selain itu terdapat perubahan pada penetapan calon peserta penerima afirmasi PADINAKES sehingga SK Kabadan No.HK.02.02/III/13963/2021 tentang peserta penerima bantuan dana Pendidikan program afirmasi Pendidikan tinggi tenaga kesehatan tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2021.

Indikator 2	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan
------------------------------	--

Adanya indikator kinerja ini untuk menyesuaikan pengembangan prodi dalam mendukung kebutuhan pembangunan kesehatan. Dari 507 prodi yang tersebar di 38 poltekkes kemenkes diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan bidang kesehatan dalam rangka pemenuhan tenaga kesehatan di fasyankes (Rumah Sakit dan Puskesmas) baik di pemerintah pusat maupun daerah dari berbagai kebutuhan tenaga kesehatan. Perbandingan capaian tahun 2020 dan 2021 indikator kinerja ini terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3. 1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2020 dan 2021



Pada tahun 2020 target pada indikator ini sebanyak 52 prodi dan lembaga, dan sudah tercapai sebanyak 89 (171,15%) prodi dan lembaga. Pada tahun 2021 secara kumulatif target menjadi 104 prodi dan lembaga dan tercapai sebanyak 138 (132,69%) prodi dan lembaga yang telah disesuaikan. Capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan menyesuaikan prodi dan lembaga baik secara kualitas dan kuantitas. Kendala dan permasalahan dalam capaian target ini adanya covid-19 sehingga adanya kebijakan pembatasan (PPKM), efisiensi/ realokasi/ refocusing anggaran dan kebijakan RPPTKL yang menyebabkan moratorium pada proses pembukaan prodi baru. Pada masa covid -19 kegiatan program dan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja ini terus berlanjut dengan berbagai strategi salah satunya pelaksanaan kegiatan, koordinasi dan konsolidasi secara daring/online.

Indikator 3	Jumlah Tenaga Kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes Pemerintah
-----------------------	--

Indikator jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kemenkes yang di dayagunakan di Fasyankes Pemerintah awalnya merupakan indikator kinerja Sekretariat Badan PPSDMK, namun pada tahun 2021 indikator kinerja ini menjadi indikator kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan. Capaian pada tahun 2021 sebanyak 764 (152,8%) lulusan mahasiswa yang bekerja di fasyankes pemerintah baik di instansi pusat, daerah, TNI/Polri, termasuk mengikuti program Nusantara Sehat.

C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN SDM TAHUN 2020 DAN 2021

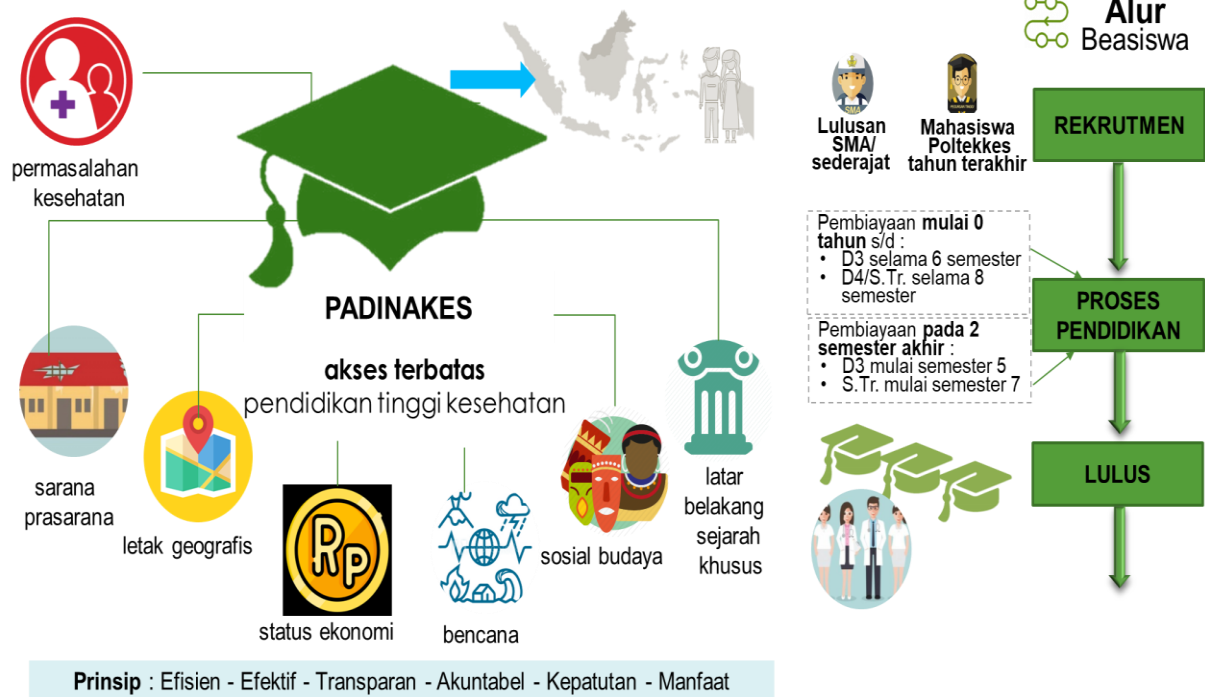
Analisis pencapaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan tahun 2020 dan 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

INDIKATOR 1

JUMLAH PENERIMA AFIRMASI BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DIUTAMAKAN PADA DAERAH BERMASALAH KESEHATAN DAN DTPK

Dalam pencapaian indikator ini melalui beberapa tahapan atau upaya yang dilakukan diantaranya sosialisasi program ke calon peserta, proses seleksi dimulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi akademik dan seleksi psikotes dan tes kesehatan. Setelah melewati rangkaian tersebut baru dinyatakan lulus sebagai peserta program afirmasi padinakes. Program afirmasi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada setiap lulusan SMU/ sederajat dan mahasiswa tingkat akhir yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan biaya Pendidikan. Rangkaian siklus secara utuh dapat dilihat pada gambar berikut.

Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes) adalah program pemberian **bantuan pendidikan** bagi putra putri Indonesia untuk mengikuti pendidikan kesehatan dan melaksanakan **pendayagunaan** setelah menyelesaikan pendidikan



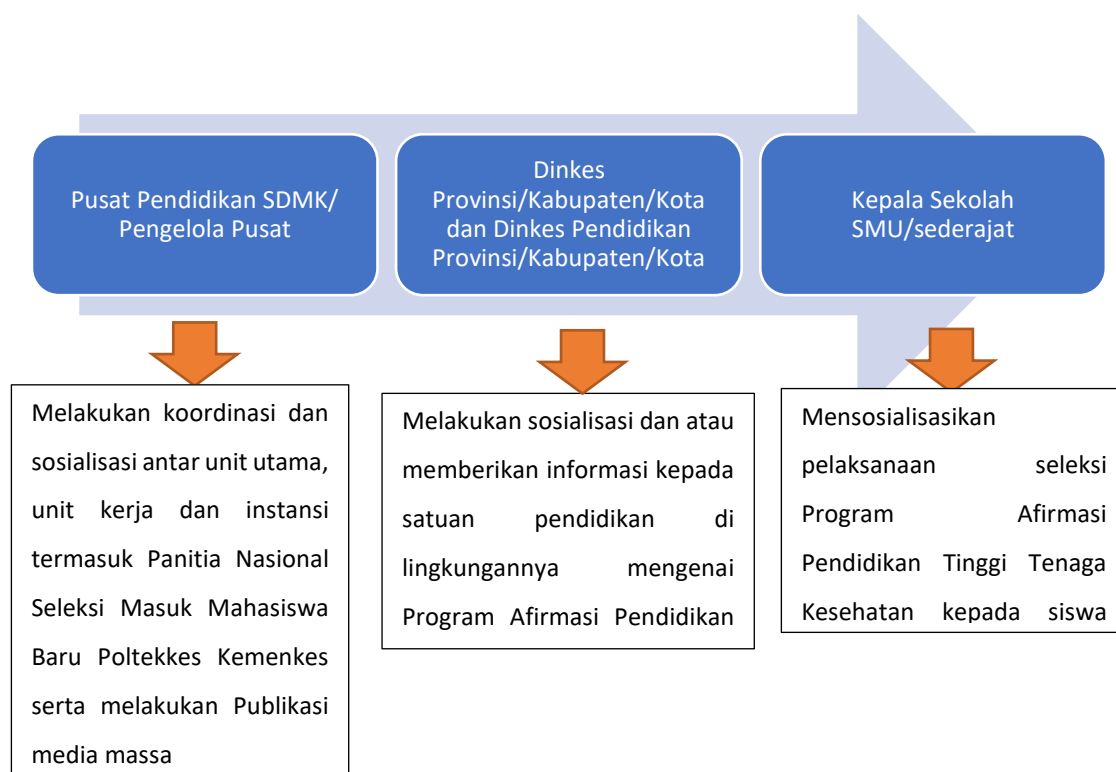
Tahapan dalam pelaksanaan program afirmasi pemberian bantuan biaya Pendidikan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan kepada pihak sekolah SMU/ sederajat, Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten/Kota, Poltekkes Kemenkes tentang penyelenggaraan program afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan dan Penugasan Khusus Pasca Pendidikan. Sosialisasi dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektor dan *press release*.

2. Mekanisme Sosialisasi

Mekanisme sosialisasi program afirmasi padinakes dapat dilihat pada gambar berikut :



3. Ketentuan Seleksi

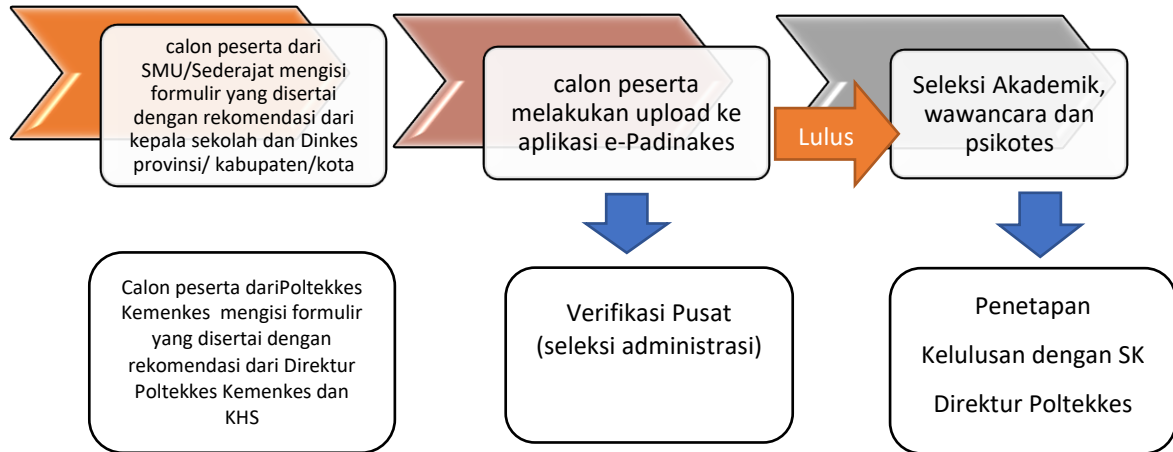
Ketentuan seleksi meliputi penetapan kuota/alokasi, pola seleksi, persyaratan calon peserta, jadwal seleksi, dan tempat seleksi yang mengacu pada juknis rekrutmen program padinakes tahun 2021.

4. Mekanisme Seleksi

Mekanisme seleksi meliputi :

- Informasi dapat diakses melalui aplikasi e-PADINAKES
- Setiap calon peserta melalui proses seleksi yang dilakukan melalui 3 tahap : seleksi administrasi, seleksi akademik, seleksi wawancara dan psikotes.

Mekanisme Seleksi Calon Peserta dari SMU/Sederajat dan Mahasiswa Tingkat Akhir

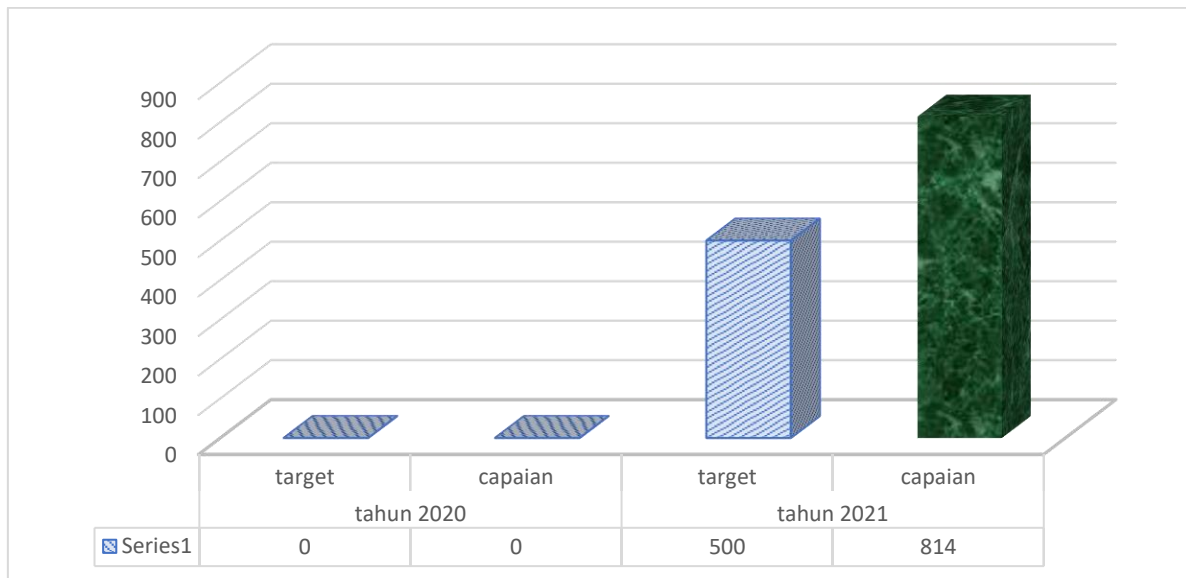


5. Syarat calon Peserta

- Lulusan SMA atau sederajat atau mahasiswa tingkat akhir pada Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes
- Diutamakan berasal dari daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan dan daerah lain.

Capaian indikator kinerja Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3. 2 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK Tahun 2020 dan 2021



Target Indikator pada tahun 2020 masih nol (0), karena merupakan program baru sehingga pada tahun 2020 baru dilaksanakan penyiapan terhadap regulasi/ kebijakan untuk pelaksanaan program AFIRMASI PADINAKES. Proses yang dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu penyusunan Permenkes Afirmasi Program PADINAKES, Draft petunjuk teknis penyelenggaraan program afirmasi, draft petunjuk teknis Pembiayaan Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan, dan Juknis Rekrutmen Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan. Pada tahun 2020 , proses penyusunan Permenkes telah selesai dan dilakukan pembahasan ke Biro Hukor Kemenkes dan dilakukan harmonisasi rancangan Permenkes Afirmasi tersebut dengan Kemenkum HAM, Kemendagri, KemenPAN RB dan BKN untuk mendapatkan persetujuan. Pada tahun 2021, pembahasan dan harmonisasi Permenkes terus berlanjut, sehingga baru di tetapkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 21 September 2021. Kemudian 3 (tiga) draft petunjuk teknis penyelenggaraan, draft petunjuk teknis rekrutmen dan petunjuk teknis pembiayaan berproses untuk pengesahan oleh Kepala Badan PPSDMK agar pelaksanaan program Afirmasi PADINAKES segera dapat dilaksanakan. Sejalan dengan proses kebijakan yang telah berlangsung, Pusdik SDMK juga melakukan pemetaan kuota di Poltekkes terutama wilayah yang mempunyai DTPK dan DBK, sehingga penetapan awal 10 Poltekkes Kemenkes yang mendapatkan program afirmasi ini

menjadi 17 Poltekkes Kemenkes. Dan pada tanggal 19 November 2021 melalui Surat Keputusan Badan PPSDMK Nomor HK.02.02/III/13963/2021 tentang Peserta Penerima Bantuan Dana Pendidikan Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan telah ditetapkan sebanyak 814 orang. Dalam pelaksanaan program PADINAKES ini, Poltekkes Kemenkes selaku UPT teknis bidang Pendidikan kesehatan turut berperan dalam penyiapan, pelaksanaan dan monitoring untuk terlaksananya program Afirmasi ini. Penyiapan yang dilakukan meliputi sosialisasi, rekrutmen termasuk melakukan seleksi calon mahasiswa yang akan mendapatkan bantuan biaya Pendidikan program afirmasi, kemudian dilakukan pemberian bantuan Pendidikan dan melakukan monitoring mahasiswa yang akan lulus sehingga dapat didorong untuk dapat didayagunakan dengan berkoordinasi ke Pusat tentunya.

Sampai saat ini capaian pada tahun 2021 yaitu sebanyak 814 orang (162,8%) orang. Target tersebut telah melebihi 100%, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada mekanisme penerimaan calon mahasiswa yang pada awalnya dirancang dari nol tahun kemudian melalui proses pembahasan berubah menjadi merekrut dari tingkat akhir semester juga agar lebih cepat dapat didayagunakan. Dari sejumlah anggaran dengan rancangan anggaran yang meliputi biaya dana pendidikan/semester, bantuan biaya hidup dan uang referensi buku, biaya tes kesehatan dan psikotes.

Dalam Permenkes 27 Tahun 2021 bagian ke enam pasal 18 disebutkan untuk pendayagunaan peserta yang telah lulus Pendidikan wajib mengikuti pendayagunaan pascapendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota asal peserta dan dapat didayagunakan melalui mekanisme:

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 2) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
- 3) Peserta dalam penugasan khusus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2021 tentang Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan yang telah disahkan pada tanggal 21 September 2021, petunjuk teknis penyelenggaraan, petunjuk teknis rekrutmen dan petunjuk teknis pembiayaan.

INDIKATOR 2
JUMLAH PRODI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN SDM KESEHATAN YANG
DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
(KUMULATIF)

Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pada ayat 3 bertujuan untuk: a) memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan; b) mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c) memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan; d) mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan; e) memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Kemudian dalam Peraturan pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan tenaga kesehatan pada pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan tenaga kesehatan meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan. Dalam Bab III tentang pengadaan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dan dilaksanakan melalui Pendidikan tinggi bidang kesehatan. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan sebagai unit pembina Poltekkes Kemenkes, dimana Poltekkes Kemenkes sebagai intansi yang mengadakan tenaga kesehatan. Untuk mengimplemantasikan amanat UU dan PP tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ditetapkan sebagai indikator kinerja Pusdik SDM Kesehatan tahun 2020-2024 dengan indikator jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (target kumulatif).

Capaian indikator ini pada tahun 2020 tercapai sebanyak 89 (171,15%) dari target 52 dan 138 (132,69%) dari target 104 prodi dan lembaga yang disesuaikan. Dalam pencapaian target penyesuaian prodi dan lembaga, Poltekkes sebagai unit penyelenggaran Pendidikan bidang kesehatan berperan dalam pembukaan, pengembangan bahkan penutupan prodi, pengembangan menjadi kelas internasional dan Pusat unggulan IPTEKS poltekkes dalam bidang penelitian dan pengabmas, penyesuaian pada pembukaan prodi baru, Poltekkes Kemenkes juga harus melakukan persiapan, perencanaan program dan anggaran agar terlaksananya program tersebut, sehingga dalam penyesuaian terhadap prodi dan lembaga dapat bersinergi dengan target yang telah ditetapkan oleh Pusat.

Analisis perbandingan capaian indikator kinerja Prodi Dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan tahun 2020 dan 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Grafik 3. 3 Analisis Pencapaian Kinerja Indikator Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2020 dan 2021



Pada tahun 2020 telah ditetapkan target pada indikator kinerja ini sebanyak 52 prodi dan lembaga yang disesuaikan dengan capaian 89 prodi dan lembaga (171,15%). Capaian tersebut di hitung dari kuantitas dan kualitas prodi dan lembaga. Adapun capaian secara kuantitas diperoleh dari adanya penambahan jumlah prodi baru yaitu sebanyak 7 prodi Poltekkes Kemenkes. Capaian secara kualitas di peroleh dari meningkatnya status akreditasi menjadi 62 prodi (di hitung melalui peningkatan status akreditasi yaitu C menjadi B, B menjadi A. pengembangan pusat unggulan IPTEKS Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) atau *Center of excellent* (CoE) di 5 prodi Poltekkes Kemenkes dan pengembangan prodi Ners Rintisan Kelas Internasional (RKI) di 9 Poltekkes Kemenkes serta perluasan 6 kerjasama dengan mitra di dalam negeri. Capaian pada tahun 2020 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 dari target 104 prodi dan lembaga yang ditetapkan secara kumulatif, sudah tercapai sebanyak 138 (132,69%) prodi dan lembaga yang di sesuaikan. Cara perhitungan capaian masih sama dengan tahun 2020. Penambahan capaian pada

kuantitas yaitu pembukaan prodi baru DIII Pengawasan Epidemiologi, sedangkan secara kualitas adanya penambahan Poltekkes Kemenkes dalam pengembangan *Center of Excellent (CoE)* yaitu Poltekkes Kemenkes Medan, Poltekkes Kemenkes Surakarta, Poltekkes Kemenkes Padang, Poltekkes Kemenkes Jakarta II dan Poltekkes Kemenkes Manado, dan akreditasi prodi pada sarjana terapan terapi gigi di Poltekkes Bandung dan Tasikmalaya dan 25 prodi yang meningkat status akreditasinya. (terlampir). Dalam pelaksanaan rintisan kelas internasional (RKI) dengan menggunakan kurikulum standar internasional, pembelajaran menggunakan Bahasa internasional sehingga lulusannya pun tersertifikasi dan dapat didayagunakan di dunia internasional. Dalam pengembangan CoE dinilai dari 3 kriteria penilaian yaitu kriteria akademik, kinerja komersialisasi dan implementasi dan kinerja kelembagaan. Kendala dalam penyesuaian prodi dan lembaga Poltekkes Kemenkes adanya isu RPPTKL yang mengamanatkan bahwa Pendidikan kesehatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan harus bersifat ikatan Dinas dengan prasyarat prodi dan lembaga yang dikembangkan merupakan prodi yang langka atau akan menjadi unit pelaksana Kemendikbudristek sehingga saat ini masih terus dilakukan pembahasan. Adanya kebijakan tersebut menyebabkan pembukaan prodi masih di moratorium.

INDIKATOR 3

JUMLAH TENAGA KESEHATAN LULUSAN POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI YANG DIDAYAGUNAKAN DI FASYANKES PEMERINTAH

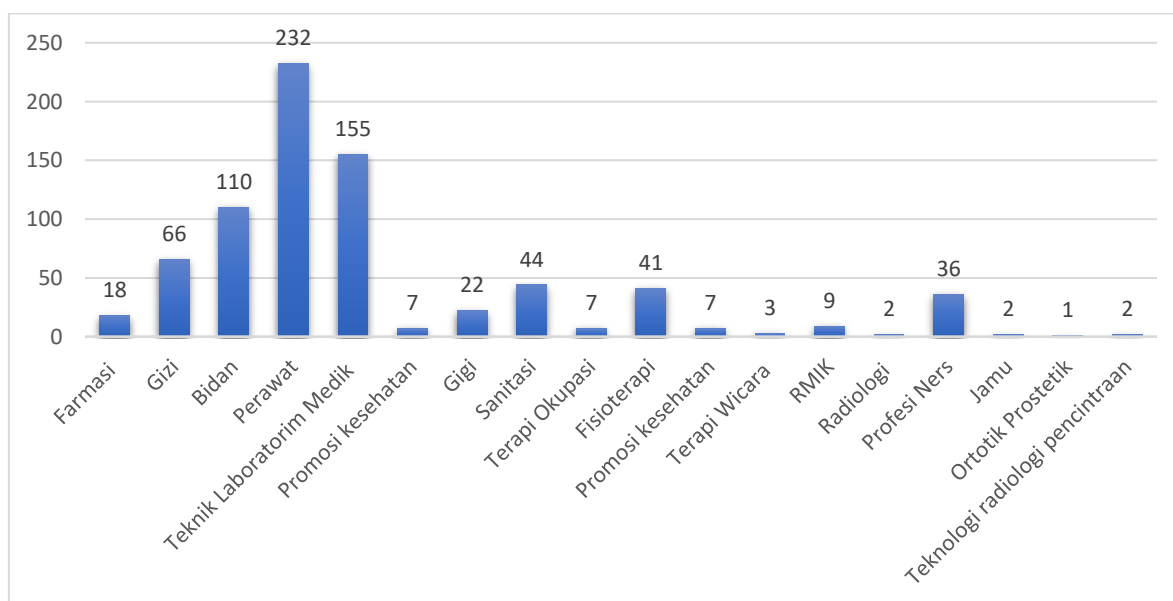
Indikator ini sebelumnya menjadi indikator kinerja Sekretariat Badan PPSDMK, tepatnya pada periode renstra 2015-2019. Pada tahun 2020 indikator kinerja ini tidak lagi menjadi indikator kinerja Sekretariat Badan PPSDMK sehingga pada tahun 2021 indikator ini dianggap penting dan strategis kemudian menjadi indikator kinerja Pusdik SDM Kesehatan dikarenakan secara teknis pembinaan Poltekkes Kemenkes berada di bawah Pusdik SDM Kesehatan. Tujuan dirumuskan indikator kinerja ini untuk mengetahui seberapa besar jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes yang bekerja di fasyankes pemerintah.

Target pada tahun 2021 sebanyak 500 mahasiswa lulusan Poltekkes Kemenkes yang bekerja di Fasyankes Pemerintah, capaian pada tahun 2021 telah melebihi 100% yaitu sebanyak 764 orang (152,8%). Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator ini, Pusdik SDM Kesehatan terus melakukan koordinasi terkait pendataan di Poltekkes Kemenkes dan

Pemerintah Daerah, konsolidasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), KemenPanRB untuk formasi, kerjasama dengan Pusren-Gun dalam pendayagunaan lulusan Poltekkes Kemenkes. Poltekkes Kemenkes mendukung capaian indikator ini melalui kerjasama dengan Pemda dan penyiapan lulusan agar siap di dayagunakan terutama untuk pemenuhan tenaga kesehatan yang masih kurang pada Pemda nya masing-masing, baik melalui NS, PPPK dan strategi lain. Poltekkes juga rutin melakukan pemantauan lulusan melalui *tracer study* lulusan agar dapat diketahui informasi lulusan yang sudah bekerja baik di instansi Pemerintah maupun swasta.

Dari capaian 764 tersebut tersebar pada 18 program studi diantaranya farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, Teknik laboratorium medik, promosi kesehatan, gigi, sanitasi, terapi okupasi, fisioterapi, promosi kesehatan, terapi wicara, RMIK, radiologi, profesi Ners, jamu, ortotik prostetik, dan teknologi radiologi pencitraan program sarjana terapan (terlampir). Jumlah capaian berdasarkan prodi dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.4 Distribusi Lulusan Berdasarkan Jurusan Poltekkes Kemenkes T.A 2021



D. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET RPJMN

Penetapan target kinerja telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun periode 2020-2024. Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 dengan target RPJMN dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021 Dengan Target RPJMN

INDIKATOR	Tahun 2020				Tahun 2021			
	Target	Capaian	Target RPJMN 2024	%	Target	Capaian	Target RPJMN 2024	%
Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	0	0	260	0	500 orang	814	1500	54.3%
Jumlah Prodi dan lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan*(kumulatif)	52 prodi dan lembaga	89	260	34.2%	104 prodi dan lembaga	138	260	53.1%
Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes pemerintah					500 orang	764	1500	50.9%

Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, capaian kinerja untuk indikator jumlah penerima afirmasi bantuan Pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK memang masih nol (0) karena program ini merupakan program baru sehingga pada tahun 2020 tersebut baru dilakukan penyiapan regulasi/NSPK terkait program tersebut. Sedangkan untuk tahun 2021 telah tercapai sebesar 54,2% (814 orang) dari target RPJMN 1.500 prodi dan lembaga. Untuk indikator jumlah prodi dan lembaga Pendidikan SDM Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan pada tahun 2020, capaian kinerja jika dibandingkan dengan target RPJMN sudah tercapai sebesar 34,2%. Sedangkan untuk tahun 2021 capaian kinerja meningkat capaiannya menjadi 53,1%. Untuk indikator kinerja jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes pemerintah pada tahun 2020 belum menjadi indikator kinerja Pusdik SDM Kesehatan, baru pada tahun 2021 *given* indikator tersebut dengan target 500 orang. Capaian indikator ini jika dibandingkan dengan target telah tercapai sebanyak 50,9%.

Saat ini Badan PPSPDMK telah berubah menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Pusdik SDM Kesehatan berubah menjadi Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan. Dengan adanya perubahan tersebut, maka perencanaan program kegiatan menjadi berubah. Selain itu adanya kebijakan terkait transformasi SDM Kesehatan sehingga dilakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan Dirjen Penyediaan Tenaga Kesehatan.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi manusiawi sebagai penggerak sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. SDM di Pusdik SDM Kesehatan sebagai penggerak utama program dan kegiatan memiliki beragam potensi dan kompetensi dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Pusdik SDM Kesehatan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) pada tanggal 31 Desember 2021, Pusdik SDM Kesehatan memiliki jumlah pegawai sebanyak 70 orang. Karakteristik dari SDM tersebut berbeda-beda dan akan diuraikan berdasarkan jabatan, kelompok umur, jenis kelamin, golongan dan pendidikan terakhir.

Tabel 3. 6 Data SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021

No	Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Pusat	Jabatan Struktural	1
2	Kepala Administrasi Umum	Jabatan Struktural	1
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Jabatan Fungsional Teknis	3
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Jabatan Fungsional Teknis	9
5	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Jabatan Fungsional Teknis	1
6	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Jabatan Fungsional Teknis	1
7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Jabatan Fungsional Teknis	1
8	Pranata Keuangan APBN Mahir	Jabatan Fungsional Teknis	1

9	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Jabatan Fungsional Teknis	1
10	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Jabatan Fungsional Teknis	6
11	Arsiparis Ahli Pertama	Jabatan Fungsional Teknis	1
12	Analisis Kebijakan/ Penyusun Bahan Kebijakan	Jabatan Fungsional Umum	20
13	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		2
14	Analisis Keuangan		1
15	Pranata Komputer Ahli/Sistem Informasi		1
16	Arsiparis		8
17	Tenaga Pramubakti		Honoror
18	Tenaga Pengemudi	Honoror	1
Jumlah			70

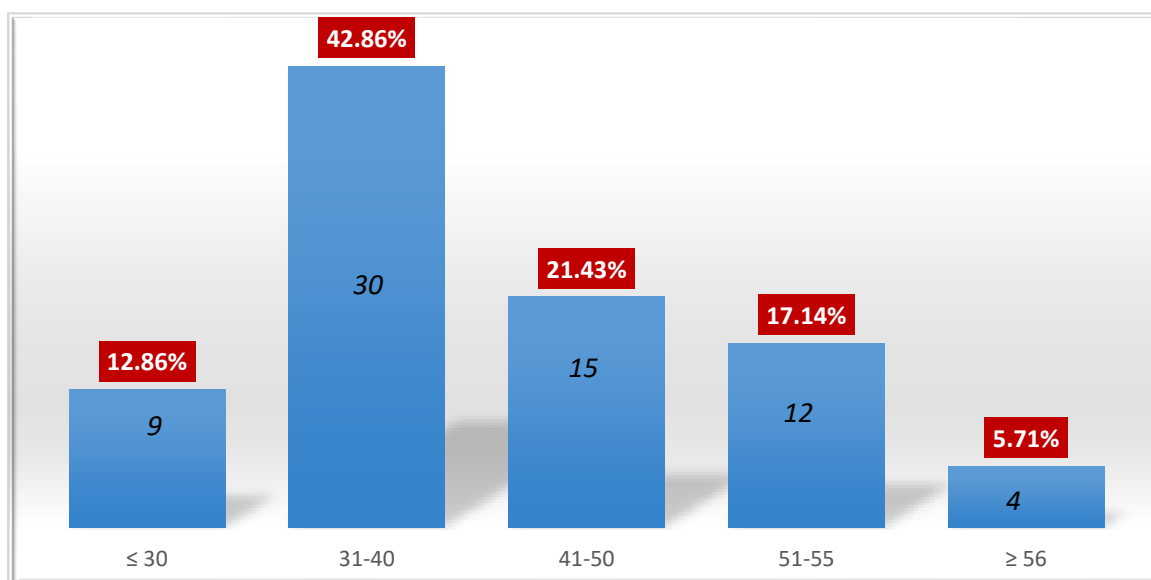
Sumber : Bagian Kepegawaian Pusdik SDM Kesehatan (SIMKA)

Pada tabel 3.6 di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusdik SDM Kesehatan dilakukan oleh 70 orang pegawai Pusdik SDM Kesehatan terbagi dalam kelompok jabatan struktural, jabatan fungsional teknis, jabatan fungsional umum dan tenaga honoror, yang terdiri dari 58 orang pegawai negeri sipil dan 12 orang pegawai honoror.

Dari 58 orang pegawai negeri sipil tersebut sebanyak 2 orang (3,45%) merupakan jabatan struktural yaitu Kepala Pusdik SDM Kesehatan dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, 32 orang (55,17%) menduduki Jabatan fungsional umum, sedangkan sebanyak 24 orang (41,38%) masih menduduki jabatan fungsional umum. Saat ini sesuai arahan pengembangan ASN, bahwa akan tidak ada lagi jabatan fungsional umum namun semua pegawai diarahkan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat 5 (lima) staf Pusdik SDM Kesehatan yang melanjutkan tugas belajar, sehingga jumlah pegawai Pusdik SDM Kesehatan menjadi 65 orang pegawai termasuk Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan.

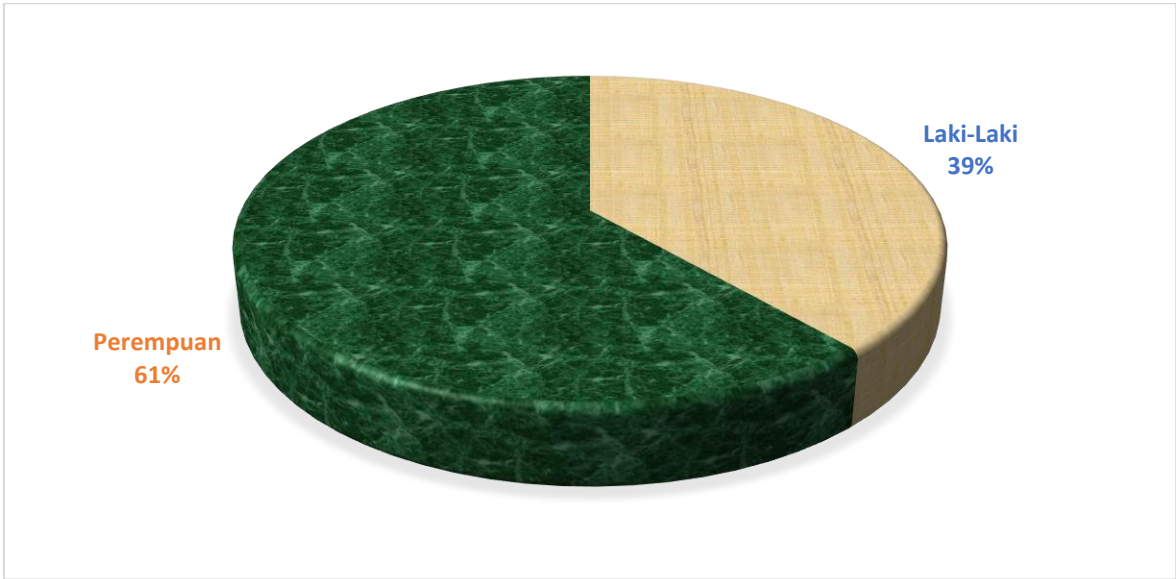
Dalam mencapai kinerja Pusdik SDM Kesehatan tentunya dipengaruhi oleh karakteristik dari SDM tersebut seperti usia, jenis kelamin, pangkat/golongan dan Pendidikan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Grafik 3. 5 Persentase Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Umur Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021



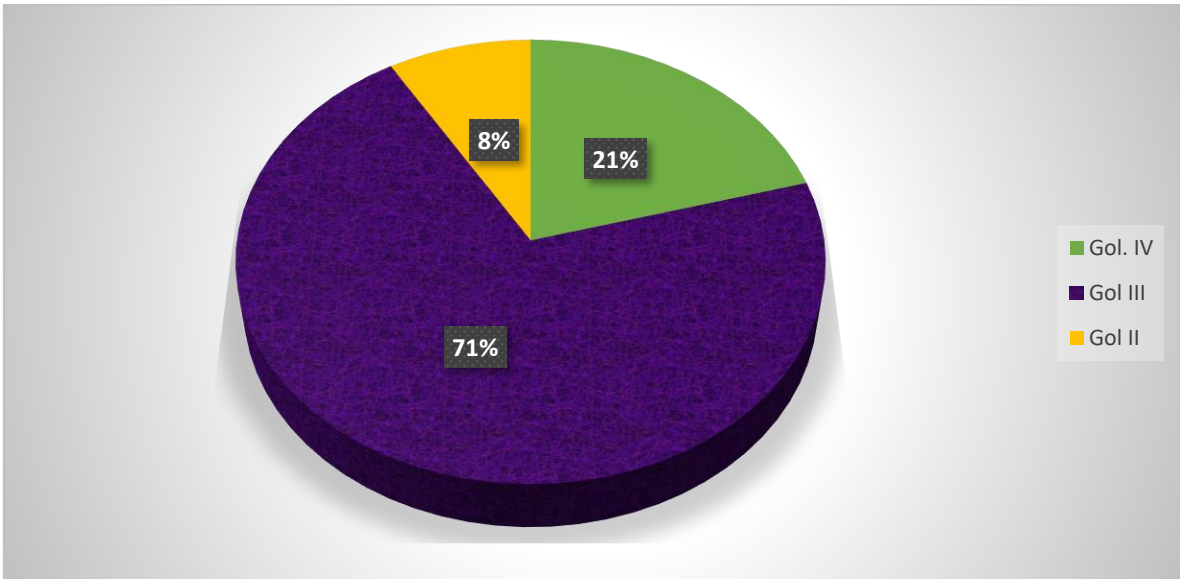
Berdasarkan grafik 3.5 di atas, kelompok umur pegawai Pusdik SDM Kesehatan sebagian besar berusia antara 31 – 40 tahun yaitu 42,86 % (30 orang) dari 70 orang pegawai. Sedangkan kelompok umur di atas 56 tahun atau mendekati usia pensiun sebanyak 5,71 % (4 orang) dari 70 orang pegawai.

Grafik 3. 6 Persentase SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021



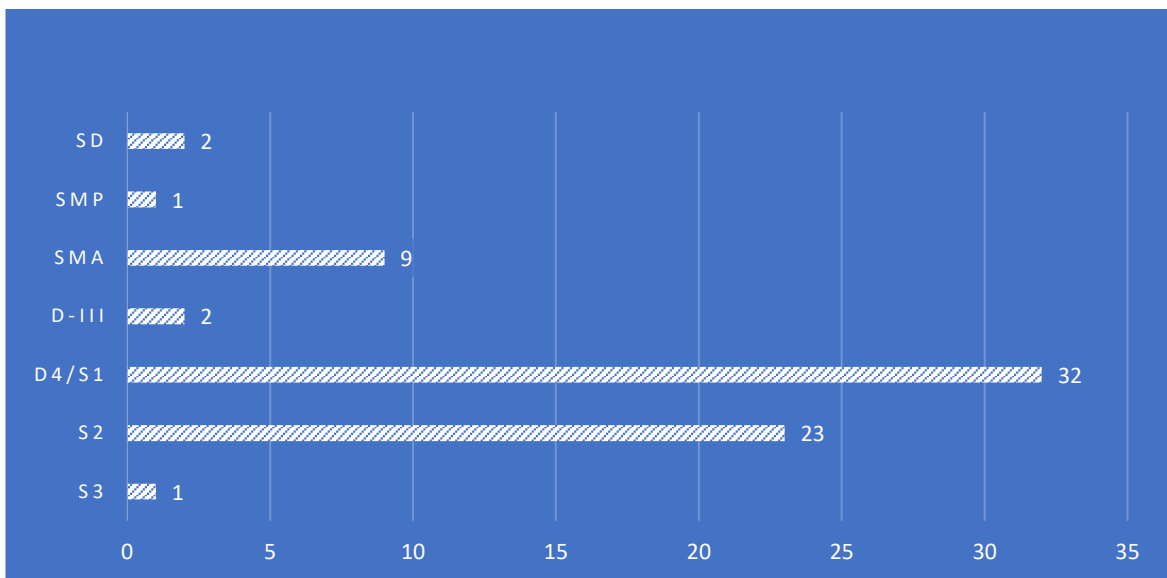
Berdasarkan grafik 3.6 di atas SDM Pusdik SDM Kesehatan didominasi oleh pegawai berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 61 % (43 orang) dari 69 orang dan laki- laki sebesar 39 % (27 orang).

Grafik 3. 7 Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021



Pada grafik 3.7 dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pusdik SDM Kesehatan memiliki golongan III atau sebesar 70,69% (41 orang) dari 58 orang pegawai, golongan IV sebanyak 20,69% (12 orang) dan golongan II sebanyak 8,62% (5 orang). Golongan kepegawaian tersebut ditentukan oleh masa kerja dan latar belakang pendidikan.

Grafik 3. 8 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021



Pada grafik 3.7 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas tingkat pendidikan terakhir adalah D-IV/S1 yaitu sebanyak 32 orang termasuk tenaga honorer dan pendidikan S2 sebanyak 23 orang. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Pusdik SDM Kesehatan dengan formal dan non formal. Upaya formal dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan melalui tugas belajar dan ijin belajar. Adapun pendidikan yang diikuti diarahkan dan disesuaikan dengan tugas pokok pegawai tersebut untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan Pusdik SDM Kesehatan. Sedangkan upaya non formal untuk meningkatkan kompetensinya dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan/seminar/workshop sesuai dengan kompetensi pekerjaannya.

2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan program dan kegiatan Pusdik SDM Kesehatan ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk urusan administrasi perkantoran, ketatausahaan dan untuk urusan Bidang Teknis Pendidikan SDM Kesehatan yang meliputi Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan, Bidang Pendidikan SDM Kesehatan dan Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu berada. Selain itu operasional perkantoran didukung juga dengan perangkat pengolah data seperti komputer,

laptop, printer, LCD, scanner, dan fasilitas perkantoran seperti mesin penghancur kertas, dll. Secara lengkap daftar inventaris barang milik negara (BMN) Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021 pada lampiran.

3. Pembiayaan

Alokasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan tahun 2021 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusdik SDM Kesehatan Nomor: SP DIPA-024.12.1.258490/2021 tanggal 23 November 2020 adalah sebesar Rp. 69.023.865.000. Dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 Pusdik SDM Kesehatan telah melakukan tujuh kali revisi DIPA dalam rangka antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja, sampai saat ini terhitung efisiensi sebesar Rp 21.579.375.000 sehingga alokasi Pusdik SDM Kesehatan sampai dengan Desember Rp 48.284.091.000.

Analisa efisiensi penggunaan sumberdaya terhadap kinerja Pusdik SDM Kesehatan Pencapaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan didukung oleh adanya SDM yang kompeten, disiplin dan berkualitas. Indikator dalam keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dari penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Nilai	Kategori
91- ke atas	Sangat Baik
76-90	Baik
61-75	Cukup
51-60	Kurang
50 ke bawah	Buruk

Berdasarkan data kepegawaian hasil penilaian prestasi kerja untuk seluruh pegawai Pusdik SDM Kesehatan untuk Tahun 2021 bernilai baik atau dalam rentang 76 – 90 yang berarti bahwa pegawai Pusdik SDM Kesehatan memiliki kinerja yang baik. Keterkaitan kerja

SDM Pusdik SDM Kesehatan tersebut terlihat juga pada pencapaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan yang menunjukkan adanya efisiensi terhadap penggunaan anggaran yang ada pada DIPA Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Perbandingan Jumlah SDM dan Penggunaan Anggaran (DIPA Pusdik SDM Kesehatan) Terhadap Pencapaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021

Satker	Σ SDM	Alokasi	Realisasi (Bruto)	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja KRO/RO
Pusdik SDM Kesehatan	65 orang	48.284.091.000	46.635.843.416 (96,59)	149.43%	107,99%

Berdasarkan tabel 3.8 di atas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan bila dibandingkan dengan jumlah pegawai sebanyak 65 orang (tidak termasuk tubel) tanpa memperhatikan karakteristik SDM (jabatan, latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin) dapat mencapai rata-rata kinerja indikator sebesar 149.43 % dan rata-rata kinerja output sebesar 107,99%. Berdasarkan hal tersebut jika melihat realisasi anggaran tercapai 96,45% dan kinerja melebihi 100% maka Pusdik SDM telah mencapai efisien dalam mencapai kinerjanya.

Selain itu dalam menunjang pencapaian output kegiatan, Pusdik SDM Kesehatan mengupayakan untuk menggunakan sarana prasarana yang tersedia secara maksimal baik untuk peralatan pengolah data (komputer, laptop, printer, scanner, LCD, dll) maupun peralatan fasilitas perkantoran lainnya (mesin penghancur kertas). Apabila dalam pelaksanaan terdapat kendala dalam pemakaian dilakukan pemeliharaan mesin/peralatan secara berkala untuk memaksimalkan fungsi dari mesin/peralatan tersebut.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam pencapaian kinerja terdapat kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian perjanjian kinerja. Pada tahun 2020, sistem perencanaan dan penganggaran di sesuaikan dengan rincian klasifikasi rincian output dan rincian output (KRO/RO). Penyusunan tersebut mengacu kepada pedoman redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga tahun 2020 yang disepakati oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas RI. KRO/RO Pusdik SDM Kesehatan dalam mendukung capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan berdasarkan KRO/RO dalam mencapai kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2021

KODE	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%	ALOKASI	REALISASI	%	CAPAIAN OUTPUT KINERJA
258490	PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN				48,284,091,000	46,635,834,416	96.59%	
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				40,967,824,000	39,588,615,724	96.63%	
2077	Pendidikan SDM Kesehatan				40,967,824,000	39,588,615,724	96.63%	
2077.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100%	609,532,000	606,505,146	99.50%	
2077.ABG.001	Kebijakan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	100%	609,532,000	606,505,146	99.50%	1. Kebijakan Teknis Peningkatan Peran PTS dan PTK 2. Kebijakan Penambahan/Pembatasan Kuota Mahasiswa 3. Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan
2077.ADA	Standarisasi Produk	59 produk	59 produk	100%	5,830,270,000	5,751,953,301	98.66%	
2077.ADA.001	Bahan Ajar Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Terstandar Nasional	23 Produk	23 Produk	100%	796,100,000	795,168,270	99.88%	18 Modul Ajar (Manajemen Farmasi, Teknologo Sediaan Solid Farmasi, Teknologi Sediaan Liquid dan semisolid, Metode Terapi Akupuntur, Kasus-kasus Akupuntur, Asuhan Terapi Akupuntur, Kodifikasi Morbiditas dan Mortalitas, Pembiayaan Kesehatan, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan, Trantibial Prosthetic, Ankle Foot Orthotic, Upper Limb Prosthetic, Bakteriologi, Kimia Klinik, Hematologi, Gigi Tiruan Sebagian Lepas, Gigi Tiruan Cetak Metal dan Ortodonti) 3 Modul MKDU (Agama, Kewirausahaan, B, Inggris) 2 Konten Pembelajaran (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi serta Bantuan Hidup Dasar)

2077.ADA.002	Soal Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	36 Produk	36 Produk	100%	5,034,170,000	4,956,785,031	98.46%	36 Kelompok soal (Prodi DIII => Gizi, Sanitasi, Radiologi, Terapi Wicara, Okupasi Terapi, Akupuntur, Kesehatan Gigi, Teknik Laboratorium Medik, Ortetik Prostetik, Fisioterapi, Teknik Elektromedik, Kebidanan, Keperawatan, Jamu, Teknologi Transfusi Darah, Teknik Kardiovaskuler, teknik Gigi, RMIK, Optometri) Prodi D4 (Gizi dan Dietetika, Sanitasi Lingkungan, Pencitraan, Terapi wicara, Okupasi Terapi, Akupuntur, Terapi Gigi dan Mulut, Teknik Laboratorium Medik, Ortetik Prostetik, Fisioterapi, Teknik Elektromedik, Profesi Bidang, Profesi Ners, Promosi Kesehatan, keperawatan Anestesi, profesi Gizi, RMIK)
2077.AEC	Kerja sama	18 Kesepakatan	18 Kesepakatan	100%	2,639,266,000	2,462,527,781	93.30%	
2077.AEC.001	Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	18 Kesepakatan	18 Kesepakatan	100%	2,639,266,000	2,462,527,781	93.30%	10 Dokumen Detasering. 5 Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Pendidikan Kesehatan Dalam dan Luar Negeri. 3 Dokumen Kerjasama Program Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Internasional bagi Mahasiswa.
2077.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	50 NSPK	50 NSPK	100%	1,242,277,000	1,194,779,387	96.18%	
2077.AFA.001	NSPK Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	50 NSPK	50 NSPK	100%	1,242,277,000	1,194,779,387	96.18%	5 Kurikulum (DIII Fisioterapi, DIV Terapi Wicara, DIII Jamu, D-III Teknik Gigi, D-III Kesehatan Gigi) 6 Juknis (Juknis Akreditasi Institusi (9 Kriteria), Pedoman RKI Poltekkes Kemenkes, Pedoman Tracer Study, Juknis Pengembangan Pusat Unggulan IPTEKS Poltekkes, Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes, Pedoman penilaian Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes) 38 Statuta Poltekkes Kemenkes
2077.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	180 Lembaga	180 Lembaga	100%	18,503,749,000	18,157,701,375	98.13%	
2077.BDB.001	Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Meningkatkan Status Akreditasinya	28 Lembaga	28 Lembaga	100%	3,234,095,000	2,966,901,594	91.74%	Pendampingan dan pembinaan di 28 Poltekkes
2077.BDB.002	Poltekkes Kemenkes Yang Mengimplementasikan Pembelajaran sesuai Dengan SN-DIKTI	38 Lembaga	38 Lembaga	100%	8,731,704,000	8,720,592,821	99.87%	Pengembangan pembelajaran daring di 38 Poltekkes Kemenkes
2077.BDB.003	Poltekkes Kemenkes Yang Meningkatkan Kinerja Publikasi, Penelitian dan Pengabmasnya	38 Lembaga	38 Lembaga	100%	6,022,583,000	5,972,546,604	99.17%	Bimbingan Teknis Penelitian dan Publikasi Ilmiah, Bimbingan teknis Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Poltekkes Kemenkes, Penguatan Konsep Pembinaan Wilayah (Desa Binaan)
2077.BDB.004	Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes	38 Lembaga	38 Lembaga	100%	492,567,000	475,540,956	96.54%	Seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama Poltekkes Kemenkes
2077.BDB.005	Klasterisasi Poltekkes Kemenkes	38 Lembaga	38 Lembaga	100%	22,800,000	22,119,400	97.01%	Klasterisasi dan penilaian Poltekkes Kemenkes
2077.DBA	Pendidikan Tinggi	298 Orang	702 Orang	235,57 %	1,605,617,000	1,551,348,119	96.62%	
2077.DBA.001	Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Berprestasi	298 Orang	702 Orang	235.57 %	1,605,617,000	1,551,348,119	96.62%	38 orang kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Poltekkes Kemenkes Tingkat Nasional 50 orang Kegiatan PIMNAKESNAS

								614 orang mengikuti workshop pembinaan Soft Skill
2077.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	4622 Orang	4622 Orang	100%	8,171,886,000	7,951,895,624	97.31%	
2077.DCI.001	Dosen dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	4622 Orang	4622 Orang	100%	8,171,886,000	7,951,895,624	97.31%	300 orang (peningkatan kapasitas Dosen dalam Metodologi Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi) 120 orang (peningkatan Kapasitas Dosen Dalam Penguatan Metodologi Pembelajaran aktif) 60 orang (Peningkatan kapasitas Reviewer penelitian) 60 orang (Peningkatan kapasitas dosen reviewer pengabdian masyarakat) 150 orang (Peningkatan kapasitas pengelolaan kerjasama Poltekkes Kemenkes) 120 orang (peningkatan kapasitas tenaga Kependidikan Poltekkes Kemenkes) 90 orang (Peningkatan kapasitas jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan) 1235 orang (Peningkatan kapasitas penataan dokumen akreditasi) 807 orang (workshop manajemen laboratorium Poltekkes kemenkes) 1500 orang (workshop penilaian beban kerja dosen) 40 orang (Program magang SDM Poltekkes kemenkes) 10 orang (penilaian dan pelaksanaan dosen berprestasi)
2077.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	100%	1,155,235,000	1,112,346,595	96.29%	
2077.FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah	1 Daerah	1 Daerah	100%	1,155,235,000	1,112,346,595	96.29%	Binwil provinsi Papua
2077.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	52 Lembaga	52 Lembaga	100%	1,314,908,000	1,117,072,089	84.95%	
2077.QDB.001	Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan	52 Lembaga	52 Lembaga	100%	1,314,908,000	1,117,072,089	84.95%	1. Pengembangan prodi di Poltekkes Kemenkes 27 lembaga (TRR, TEM, TBD, Audiologi) (terlampir) 2. Penyesuaian kelembagaan institusi 10 lembaga (terlampir) 3. Bimbingan Teknis RKI di 9 Poltekkes (Padang, Tasikmalaya, Surabaya, Manado, Kupang, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jakarta I, Banten, Mataram) 4. Center of Exellent 5 lembaga (Medan, Surakarta, Padang, Manado dan Jakarta II) 5. Penyesuaian prodi Jayapura
2077.QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	814 Orang	814 Orang	100%	1,134,497,000	938,990,720	82.77%	
2077.QEJ.001	Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	814 Orang	814 Orang	100%	1,134,497,000	938,990,720	82.77%	Poltekkes Kemenkes Aceh = 65 orang, Poltekkes Kemenkes Bengkulu = 50 orang, Poltekkes Kemenkes Jakarta III = 30 orang, Poltekkes Kemenkes Bandung = 30 orang, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya = 45 orang, Poltekkes Kemenkes Semarang = 55 orang, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta = 30 orang, Poltekkes Kemenkes Surabaya = 30 orang, Poltekkes Kemenkes Malang = 30

								orang, Poltekkes Kemenkes Denpasar = 19 orang, Poltekkes Kemenkes Mataram = 24 orang, Poltekkes Kemenkes Kupang = 88 orang, Poltekkes Kemenkes Pontianak = 82 orang, Poltekkes Kemenkes Makassar = 51 orang, Poltekkes Kemenkes Manado = 35 orang, Poltekkes Kemenkes Maluku = 98 orang, dan Poltekkes Kemenkes Jayapura = 52 orang
2077.SBA	Pendidikan Tinggi	500 Orang	500 Orang	152,8%	576,915,000	559,823,587	97.04%	
2077.SBA.001	Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kemenkes Yang Didayagunakan di Fasyankes Pemerintah	500 Orang	764 Orang	152.8%	576,915,000	559,823,587	97.04%	Data Tracer Study
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen				5,499,939,000	5,230,899,692	95.11%	
4817	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan				5,499,939,000	5,230,899,692	95.11%	
4817.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	2,100,493,000	1,977,221,482	94.13%	
4817.EAA.039	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	2,100,493,000	1,977,221,482	94.13%	Belanja keperluan perkantoran, belanja honor operasional satker, belanja persediaan barang konsumsi, belanja sewa yang rutin direalisasikan tiap bulan
4817.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%	232,996,000	226,519,309	97.22%	
4817.EAB.039	Rencana Program dan Anggaran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	232,996,000	226,519,309	97.22%	Revisi RKA/KL TA 2021 (9 Dokumen) DIPA Pusdik SDMK TA 2022 Dokumen Renja KL
4817.EAC	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100%	2,285,319,000	2,148,415,901	94.01%	
4817.EAC.038	LAYANAN PENANGANAN COVID-19 (PEN)	1 Layanan	1 Layanan	100%	458,160,000	458,030,000	99.97%	Layanan Vaksinasi Covid-19
4817.EAC.039	Layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1,827,159,000	1,690,385,901	92.51%	Paket data zoom meeting, koordinasi dan konsolidasi lintas sektor, pendampingan.
4817.EAD	Layanan Sarana Internal	164 unit	164 unit	100%	568,441,000	568,321,000	99.98%	
4817.EAD.039	Layanan Sarana Internal Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	164 Unit	164 Unit	100%	568,441,000	568,321,000	99.98%	Lisensi Antivirus, Eksternal Hardisk, Speaker, Laptop, Printer, Tablet Android untuk EFS, Lisensi Microsoft, Camera Conference, Conference kit Mobile, 8 Filling Cabinet, 2 Dispense
4817.EAF	Layanan SDM	72 Orang	72 orang	100%	30,300,000	29,923,000	98.76%	
4817.EAF.039	Layanan Kepegawaian Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	72 Orang	72 Orang	100%	30,300,000	29,923,000	98.76%	Cuti Tahunan 15 orang Kenaikan Gaji Berkala 18 orang Kenaikan Pangkat 3 orang Pensiun 4 orang Bezetting/ data kenaikan pangkat per 3 bulan 3 dok Usulan tubel 5 orang Usulan Alih Jabatan JP ke JF 1 orang Usulan Alih Jabatan JP ke JP 1 orang

								Usulan pelatihan JF 3 orang Usul mutasi Eksternal Pusdik ke Badan 1 orang Usul pindah internal 4 orang Dokumen ABK 1 dokumen Dokumen Monev SOP 1 dokumen
4817.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2 Laporan	2 Laporan	100%	27,890,000	26,114,000	93.63%	
4817.EAL.039	Layanan Monev dan Pengelolaan Keuangan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	2 Laporan	2 Laporan	100%	27,890,000	26,114,000	93.63%	Laporan Keuangan, Laporan Kinerja
4817.EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	60 Orang	60 Orang	100%	254,500,000	254,385,000	99.95%	
4817.EAM.039	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Pegawai Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	60 Orang	60 Orang	100%	254,500,000	254,385,000	99.95%	Laporan Pengembangan Pelatihan

Pada kegiatan 2077 pendidikan SDM Kesehatan terdapat 11 KRO dan 16 RO yang telah disusun untuk mendukung pencapaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan. RO/KRO yang tersebut disusun dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Pusdik SDM Kesehatan tahun 2021. Selain itu Pusdik SDM Kesehatan juga didukung oleh kegiatan dukungan manajemen (4817) untuk mendukung kelancaran administrasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pusdik SDM Kesehatan.

G. REALISASI ANGGARAN

Dalam perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan pada tanggal 2 Desember 2020, alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 77.531.622.000, akan tetapi terjadinya realokasi/refocusing / revisi salah satunya untuk penanganan covid-19 sehingga sampai dengan 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp 60.840.729.000 termasuk realokasi Poltekkes Rp 12.556.638.000 dan UNFPA sebesar Rp 1.816.328.000. Realisasi Anggaran Total Pusdik SDM berikut realokasi Poltekkes Kemenkes Rp 58.431.651.308 (96,04 %) dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- Realisasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan sebesar Rp 46.635.843.416 (96,59%) dari alokasi Rp 48.284.091.000. Realisasi di Poltekkes Program Afirmasi PADINAKES Rp 11.795.807.892 (93,94%) dari alokasi Rp 12.556.638.000 dan Pengabmas Unggulan Rp 1.470.050.600 (99,31%) dari alokasi Rp 1.480.210.000 dan UNFPA realisasi anggaran sebesar Rp. 1.816.328.000 (100%) dari alokasi Rp 1.816.328.000.
- Dukungan Manajemen dengan realisasi Rp 5.230.899.692 (95,11%) dari alokasi 5.499.939.000.

Tabel 3. 10 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun
2021

KEGIATAN	ALOKASI	REALISASI	%
KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN	60,840,729,000	58,431,651,308	96,04%
Total Program Pendidikan Vokasi (Pusdik SDMK + Poltekkes)	55,340,790,000	53,200,751,616	96,13%
Total Dukman (4817)	5,499,939,000	5,230,899,692	95,11%
Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan (2077)	42,784,152,000	41,404,943,724	96,63%
Total Pusat Pendidikan SDM Kesehatan (2077+4817)	48,284,091,000	46,635,843,416	96,59%
Total Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan Di Poltekkes Kemenkes	12,556,638,000	11,795,807,892	93,94%

Dalam pencapaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan tentunya didukung oleh pendanaan. Alokasi dan Realisasi Dalam Mendukung Indikator Kinerja Pusdik SDM Kesehatan sebagai berikut :

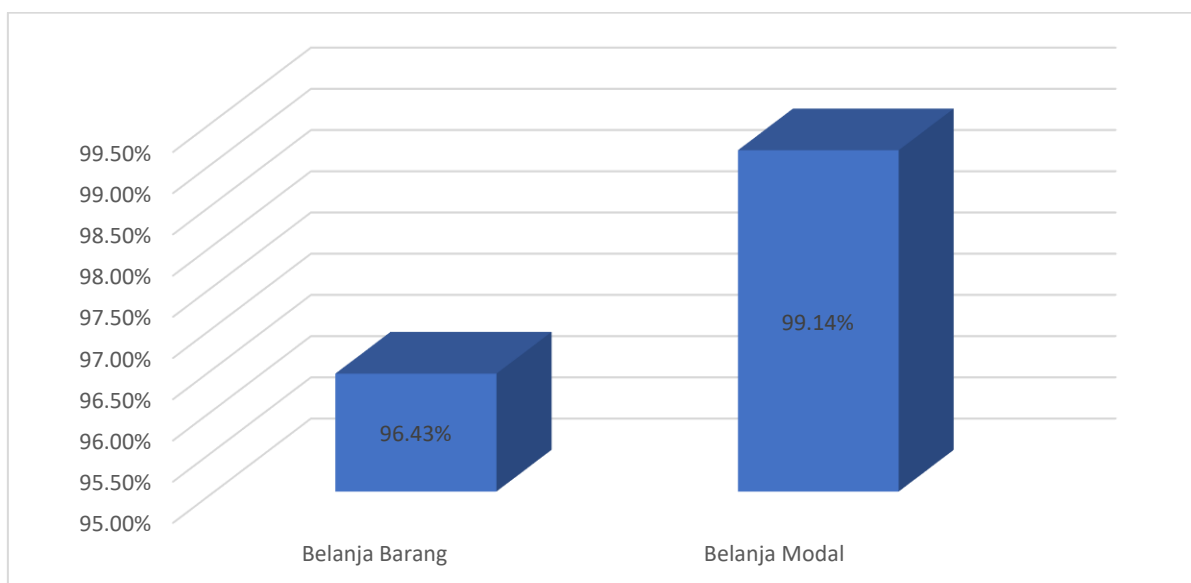
Tabel 3.11 Alokasi dan Realisasi Berdasarkan Indikator Kinerja Pusdik SDM
Kesehatan T.A 2021

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Jumlah Penerima Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan Dan DTPK	12,210,925,000	11,264,748,012	92,25%
2	Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan (kumulatif)	42,552,950,000	41,376,180,017	97.23%
3	Jumlah Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan Yang Didayagunakan Di Fasyankes Pemerintah	576,915,000	559,823,587	97.04%
Pusdik SDM Kesehatan		55,340,790,000	53,200,751,616	96,13%

Alokasi yang mendukung indikator setelah refocusing/realokasi/revisi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 55.340.790.000 berikut UNFPA. Dari alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 53,200,751,616 (96,13%). Realisasi anggaran mendukung indikator jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK sudah terealisasi sebesar 92,25% (termasuk di Poltekkes Kemenkes), indikator kinerja jumlah prodi dan lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan terealisasi sebesar 97,23% dan indikator kinerja Jumlah Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan Yang Didayagunakan Di Fasyankes Pemerintah sebesar 97.04%. Dari alokasi tersebut secara anggaran tidak 100% namun capaian kinerja indikator telah melampaui 100% sehingga dapat dikategorikan efisiensi dalam mencapai kinerja Pusdik SDM.

Alokasi dan realisasi berdasarkan jenis belanja, dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.9 Alokasi dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja T.A 2021



Pusdik SDM	Alokasi	Realisasi	%
Belanja Barang	45,419,463,000	43,795,743,416	96.43%
Belanja Modal	2,864,628,000	2,840,100,000	99.14%
JUMLAH	48,284,091,000	46,635,843,416	96.59%

Berdasarkan grafik 3.11 tersebut dapat dilihat bahwa realisasi belanja barang sebesar 96,43%, sedangkan untuk belanja modal sebesar 99,14%. Belanja modal telah dilaksanakan secara maksimal, namun untuk belanja barang perlu dilakukan strategi dan upaya agar realisasi kegiatan pada tahun selanjutnya dapat lebih baik lagi.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Pusdik SDM Kesehatan tahun 2021 merupakan laporan ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap dan jelas atas pencapaian kinerja atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja dalam penetapan kinerja Pusdik SDM Kesehatan. Selain itu laporan kinerja ini juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program terhadap pencapaian kinerja yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020 - 2024.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian indikator jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK yaitu 814 (162,8%) dari target 500. Capaian tersebut telah melebihi 100% dikarenakan adanya perubahan skema dalam pemberian bantuan biaya Pendidikan.
2. Capaian indikator jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan yaitu sebanyak 138 prodi dan Lembaga (132,7%) dari target 104 prodi dan lembaga. Dibandingkan capaian tahun 2020 capaian tahun 2021 meningkat.
3. Capaian indikator jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kemenkes RI yang di dayagunakan di fasyankes pemerintah tercapai 764 (152,8%) dari target 500 orang. Capaian indikator ini juga telah melebihi 100%.
4. Realisasi anggaran Rp 58.431.651.308 (96,04%) dari alokasi total Rp 60.840.729.000. Rincian Realisasi tersebut sebagai berikut :
 - Realisasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan sebesar Rp 46.635.843.416 (96,59%) dari alokasi Rp 48.284.091.000. Realisasi di Poltekkes Program Afirmasi PADINAKES Rp 10.325.757.292 (99,23%) dari alokasi Rp 11.076.428.000 dan Pengabmas Unggulan Rp 1.470.210.000 (99,31%) dari alokasi Rp 1.480.210.000 serta realisasi UNFPA sebesar Rp 1.816.328.000 (100%) dari alokasi Rp 1.816.328.000.
 - Dukungan Manajemen dengan realisasi Rp 5.230.899.692 (95,11%) dari alokasi 5.499.939.000.

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis agar capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan ke depannya dapat meningkat, yaitu :

1. Melakukan percepatan dan penguatan konsolidasi dan koordinasi ke Pemda dan stakeholder lainnya untuk pendayagunaan lulusan afirmasi PADINAKES.
2. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan menjadi Direktorat Tenaga Kesehatan dan transformasi SDM Kesehatan dengan melakukan sebagai berikut:
 - Melakukan review terhadap indikator, target dan capaian indikator kinerja
 - Mengidentifikasi output kegiatan (kebijakan, NSPK) yang sudah expired atau pun yang belum ada
 - Melakukan pemetaan terhadap prodi PT Kesda dan melakukan penguatan dan mendorong agar mencapai status akreditasi A minimal B
3. Menetapkan arah kebijakan pengembangan Poltekkes Kemenkes dengan adanya issue RPPTKL yang masih dalam pembahasan. Melakukan pemetaan dan analisis terhadap prodi jenuh dan langka disandingkan dengan kebutuhan.
4. Menyusun strategi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan adaptasi SATU DIPA serta adaptasi pelaksanaan kegiatan pada masa *pandemi* CoVid 19.
5. Selain itu Sub Bidang/Bagian di lingkungan Pusdik SDM Kesehatan agar melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran lebih efektif dan efisien.
 - Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran secara efisien dan efektif dalam mendukung program pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan dapat tercapai.
 - Meningkatkan peran sistem dan manajemen organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik dan lancar melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala.

LAMPIRAN

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc

Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031002

Dr. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc
NIP 196607221989031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN

No.	Besaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Ditujukan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPN	1. Jumlah penerima bantuan biaya pendidikan ditujukan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPN	100 orang
2	Pengembangan Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan	2. Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM Kesehatan yang diwujudkan dengan kebutuhan program pembanguan kesehatan (kurikulum)	104 prodi dan lembaga
3	Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI	3. Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kemenkes yang didayagunakan di lingkungan Pemerintah	500 tenaga kesehatan

Kegiatan

1. Pendidikan SDM Kesehatan

Anggaran

Rp. 77.531.422.000,-

Jakarta, 2 Desember 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Dr. dr. Maxi Sela Roudanawa, DSHM, MARS
 NIP 196405201991031001



Dr. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc
 NIP 196607221989031002

DAFTAR AKREDITASI TAHUN 2021

NO	POLTEKKES/ PRODI	STATUS AKREDITASI YANG MENINGKAT	
		SEBELUM	SESUDAH
1	D4 Terapi Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung	-	B
2	D3 Terapi Gigi Poltekkes Tasikmalaya	B	A
3	D3 Keperawatan Poltekkes Kupang	B	A
4	D3 Kebidanan Poltekkes Padang	B	A
5	D3 Farmasi Poltekkes Gorontalo	-	B
6	DIV Sanitasi Lingkungan Poltekkes Denpasar	B	A
7	Profesi Pendidikan profesi Diestisien Poltekkes Semarang	-	B
8	D3 Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Banjarmasin	B	A
9	D3 Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Banten	B	A
10	D3 Teknologi Laboratorium Medik Potekkes Denpasar	B	A
11	D4 Terapi Gigi Poltekkes Jambi	B	A
12	D3 Kebidanan Bukit Tinggi Poltekkes Padang	B	A
13	Profesi Kebidanan Poltekkes Yogyakarta	-	B
14	D3 Kebidanan Poltekkes Jakarta I	B	A
15	D3 Keperawatan Poltekkes Tasikmalaya	B	A
16	D3 Kebidanan Aceh Tengah Banda Aceh	C	B
17	D3 Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Mataram	B	A
18	DIII Keperawatan Poltekkes Padang	B	A
19	D3 Radiologi Poltekkes Jakarta III	B	A
20	Profesi Ner Poltekkes Jambi	-	B
21	DIV Keperawatan Magelang Poltekkes Semarang	B	A
22	D3 Keperawatan Belitung Poltekkes Bangka Belitung	C	B
23	D3 Keperawatan Fak-fak	C	B
24	Profesi Detisien Poltekkes Yogyakarta	-	B
25	D3 Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kupang	B	A

LULUSAN POLTEKKES KEMENKES YANG BEKERJA DI FASYANKES PEMERINTAH

No	Program Studi	Jumlah lulusan
1	Farmasi	18
2	Gizi	66
3	Bidan	110
4	Perawat	232
5	Teknik Laboratorim Medik	155
6	Promosi kesehatan	7
7	Gigi	22
8	Sanitasi	44
9	Terapi Okupasi	7
10	Fisioterapi	41
11	Promosi kesehatan	7
12	Terapi Wicara	3
13	RMIK	9
14	Radiologi	2
15	Profesi Ners	36
16	Jamu	2
17	Ortotik Prostetik	1
18	Teknologi radiologi pencitraan	2
Jumlah		764